

LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2023

RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. Renja Dinas Perikanan dan Peternakan juga disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023.

Dalam penyusunannya, Renja Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan representasi dari pelaksanaan pendekatan perencanaan partisipatif, teknokratik, politis, bottom-up dan top-down yang disinergikan dengan target kinerja/prioritas pembangunan pusat dan Provinsi Jawa Barat. Disamping itu, Renja Dinas Perikanan

dan Peternakan Tahun 2023 sekaligus merupakan rencana kerja tahun terakhir pada periode perencanaan jangka menengah tahun 2018-2023. Dengan demikian, kinerja yang ditargetkan hingga akhir periode, diarahkan untuk merealisasikan target tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan yang mendukung target kinerja daerah, serta terakumulasi dalam pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pengertian Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2023 mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 juga mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan periode tahun 2018-2023, dimana sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Bogor yang tercantum dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 **“TERWUJUDNYA KABUPATEN TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN “.**

Penyusunan Renja tahun 2023 diawali dengan tahap persiapan yaitu Renja rancangan awal, rancangan akhir hingga dokumen Renja yang telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di Tahun 2023. Dokumen Renja Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2023 disusun secara terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2023 yang bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan. Selain itu, program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan bagian dari prioritas pembangunan tahun 2023, program unggulan yang tertuang dalam slogan **“PANCAKARSA”** serta mendukung Indikator Kinerja Utama yang meliputi Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB atas dasar harga berlaku dan Skor PPH (indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan).

Arah kebijakan pelaksanaan karsa Bogor Maju yang akan ditempuh oleh Dinas Perikanan dan Peternakan adalah dengan cara membantu pelaku usaha UMKM mengembangkan produk-produk hasil perikanan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan. Upaya pengembangan produk-produk tersebut adalah dengan cara meningkatkan mutu dan kualitasnya. Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas produk perikanan dan peternakan tidak terlepas dari peran generasi muda (Milenial) yang terjun di bidang ini, maka dari itu pemerintah Kabupaten Bogor khususnya Dinas Perikanan dan Peternakan akan membantu dan memberi ruang bagi para **petani milenial** tersebut untuk mengembangkan karyanya di bidang perikanan dan peternakan.

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor mengalami perubahan sotr pada tahun 2022, dan telah sesuai dengan Peraturan

Bupati Bogor no 19 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan dan Peternakan.

1.1 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2022 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/Permen-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

- Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12); dan
22. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 63).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Startegis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023.
25. Peraturan Bupati Bogor no 19 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan dan Peternakan.
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan jangka pendek yang menjabarkan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bogor. Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 merupakan dasar atau patokan dalam penyusunan Renja Tahun 2023.

Tujuan disusunnya Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2023 sebagai landasan/pedoman dalam penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023, Penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah di tahun 2023, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor.

1.3 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2023 dilakukan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Perikanan dan Peternakan. Dalam proses penyusunan Renja juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan *stakeholders* Dinas Perikanan dan Peternakan dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renja.

Sistematika penulisan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2023 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2022

Pada bab ini menjelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Telaahan Kebijakan Nasional, dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran PD.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2021

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2018 – 2023. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Capaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Capaian tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja program dan kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pembangunan Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Bogor, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor untuk tahun 2021 memperoleh anggaran DPA yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor dan APBN (DAK) Kementerian Pertanian sebagai berikut :

➤ Pendapatan	: Rp. 640.180.000,-
➤ Belanja Daerah	: Rp. 42.426.747.000,-
- APBD MURNI	: Rp. 41.448.747.000,-

- DAK KKP : Rp. 978.000.000,-

Pada bulan Februari 2021, mengalami Refocusing menjadi:

➤ Belanja Daerah : Rp. 39.005.018.363,-

- APBD MURNI : Rp. 38.027.018.363,-

- DAK KKP : Rp. 978.000.000,-

*berkurang Rp. 3.421.728.637 dari pagu awal APBD

Pada bulan Oktober 2021, mengalami perubahan kembali menjadi:

➤ Belanja Daerah : Rp. 36.859.773.531,-

- APBD MURNI : Rp. 35.881.773.531,-

- DAK KKP : Rp. 978.000.000,-

Adapun realisasi keuangan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

➤ Belanja Daerah : Rp. 36.202.343.593,- (98,22%)

Melalui fasilitasi pelaksanaan DPA Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor tahun 2021 telah mendorong masyarakat dan swasta di Kabupaten Bogor, baik secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian keberhasilan sasaran program maupun kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam Rangka Mendukung **"Pancakarsa"** Dinas Perikanan dan Peternakan pada awalnya merencanakan adanya sub-sub kegiatan yang akan mendukung peternak milenial dan pembudidaya ikan milenial di Kabupaten Bogor. Pada Tahun 2021, sub-sub kegiatan yang mendukung peternak dan pembudidaya ikan milenial tidak dapat dilaksanakan karena refocusing anggaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 capaian indikator kinerja utama PD hingga tahun 2021

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	satuan	Target	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
indikator tujuan				
1) Produksi Perikanan	Ton	143.439	143.454,1	100,01
2) Produksi Peternakan	Ton	368.609	369.194,7	100,16
indikator sasaran				
a Jumlah Benih Ikan Konsumsi	RE	5.770.238	5.770.236	100,00
b Jumlah Populasi Ternak	Ekor	38.270.763	38.273.466	100,01

Indikator tujuan Dinas Perikanan dan Peternakan yaitu Produksi Perikanan yang terdiri dari Produksi ikan konsumsi dan produksi olahan perikanan, tercapai sebesar 143.454,1 ton atau 100,01% dari targetnya, dibandingkan dengan Tahun 2020 produksi perikanan pada Tahun 2021 naik sebesar 6,46% yaitu sebesar 134.750 ton. Indikator tujuan kedua yaitu produksi peternakan yang terdiri dari produksi daging, telur dan susu, tercapai sebesar 368.609 ton atau 100,16% dari targetnya, dibandingkan dengan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,47% yaitu sebesar 356.797 ton.

Indikator sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan antara lain jumlah benih ikan dan jumlah populasi ternak. Jumlah benih ikan mencapai 100% dari targetnya sebesar 5.770.238 RE sedangkan jumlah populasi ternak sebesar 38.273.466 RE atau 100,01% dari targetnya.

Dinas Perikanan dan Peternakan Melaksanakan program, yang terdiri dari:

- (1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri dari 1 kegiatan 3 Sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome/indicator* program) sebesar 97,99% dan tingkat capaian anggaran sebesar 98,74%. Indikator *outcome* program ini adalah Jumlah Total hasil tangkapan ikan di perairan umum dengan target sebesar 95 ton, tercapai sebesar 93,09 ton, hal ini disebabkan intensitas penangkapan (trip) yang dilakukan RTP (Rumah Tangga Perikanan) tangkap berkurang, sebagai upaya penanganan Covid 19.
- (2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya terdiri dari 4 kegiatan 8 Sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome/indicator* program) sebesar 100% dan tingkat capaian anggaran sebesar 98,16%. Indikator *outcome* program ini adalah Kontribusi Produksi Benih Ikan terhadap target total dengan target dan realisasi sebesar 33%.
- (3) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdiri dari 1 kegiatan 2 Sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome/indicator* program) sebesar 100% dan tingkat capaian anggaran sebesar 98,23%. Indikator *outcome* program ini adalah Persentase Usaha Perikanan Budidaya dan Tangkap di Perairan Umum dengan target dan realisasi sebesar 22,22%.
- (4) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari 3 kegiatan 4 Sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome/indicator* program) sebesar 100,09% dan tingkat capaian anggaran sebesar 98,86%. Indikator *outcome* program ini adalah Jumlah Total Jumlah Produksi Olahan Perikanan dengan target sebesar 16.359 ton dan realisasi sebesar 16.373,91ton.
- (5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 kegiatan 24 Sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome/indicator* program) sebesar 100,00% dan tingkat capaian anggaran sebesar 98,76%. Indikator *outcome* program ini

adalah terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan target dan realisasi sebesar 100%.

- (6) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari 3 kegiatan 3 Sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome/indicator program*) sebesar 129,76% dan tingkat capaian anggaran sebesar 99,80%. Indikator outcome program ini adalah persentase Keterpenuhan sarana Peternakan (bibit ternak) dengan target 22,25% dan realisasi sebesar 28,86%, hal ini didukung oleh jumlah distribusi DOC di UPT Perbibitan (target 40.000 ekor, realisasi 51.962 ekor atau 129,9%)
- (7) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari 2 kegiatan 7 Sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome/indicator program*) sebesar 100,00% dan tingkat capaian anggaran sebesar 95,15%. Indikator outcome program ini adalah persentase Keterpenuhan prasarana (infrastruktur)Peternakan dengan target dan realisasi sebesar 27,78%.
- (8) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari 4 kegiatan 10 Sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome/indicator program*) sebesar 100% dan tingkat capaian anggaran sebesar 98,10%. Indikator outcome program ini adalah Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dengan target dan realisasi sebesar 55%.
- (9) Program Perizinan Usaha Pertanian terdiri dari 1 kegiatan 1 Sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome/indicator program*) sebesar 100,00% dan tingkat capaian anggaran sebesar 86,83%. Indikator outcome program ini adalah Persentase Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pertanian (usaha peternakan, izin usaha obat hewan di tingkat pengecer) dengan target dan realisasi sebesar 20%.
- (10) Program Penyuluhan Pertanian terdiri dari 1 kegiatan 1 Sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome/indicator program*) sebesar

100,00% dan tingkat capaian anggaran sebesar 97,88%. Indikator outcome program ini adalah Persentase Kenaikan Kelompok dengan target dan realisasi sebesar 15%.

Keberhasilan pelaksanaan program tersebut ditandai oleh rata-rata tingkat capaian program (*outcome*) sebesar 99,76% dengan predikat kerja Sangat Tinggi.

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan, sebagai berikut :

- (1) Belum optimalnya peternak dan pembudidaya ikan dalam akses terhadap pasar, teknologi dan sumber permodalan.
- (2) Banyaknya terjadi alih fungsi lahan yang menyebabkan terdesaknya usaha Perikanan dan Peternakan.
- (3) Rendahnya tingkat penggunaan bibit ternak dan induk/benih ikan yang unggul oleh masyarakat.
- (4) Ketersediaan sarana irigasi belum memadai untuk kebutuhan budidaya perikanan.
- (5) Terbatasnya sarana dan prasarana serta personil dalam pengawasan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet).
- (6) Munculnya konflik di masyarakat akibat dampak pencemaran yang ditimbulkan oleh usaha peternakan.
- (7) Masih adanya potensi resiko penularan penyakit hewan menular dan zoonosis serta masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penularan penyakit tersebut.

Adapun Solusi/Strategi Pemecahan masalah tersebut adalah:

1. Mencermati bobot pekerjaan dari setiap kegiatan agar diperoleh skala prioritas dalam mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan.
2. Meningkatkan sinergitas antar kegiatan/program sehingga dapat mendukung pencapaian target kinerja yang ditetapkan secara maksimal.

3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas SKPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Ormas, dll sehingga kontribusi dukungan pembangunan Perikanan dan Peternakan yang berada di luar kewenangan Dinas Perikanan dan Peternakan dapat diraih.
4. Membentuk sistem pengendalian dan evaluasi kegiatan yang efektif, terutama bagi kegiatan yang dampaknya belum bisa dilihat dalam waktu singkat.
5. Memanfaatkan hasil evaluasi dan pengendalian secara optimal sebagai input bagi perencanaan pembangunan Perikanan dan Peternakan periode selanjutnya.

Pada tahun 2021 Kabupaten Bogor masih mengalami pandemi covid 19 walaupun sudah menurun level penyebarannya sehingga masih berpengaruh terhadap pembangunan perikanan dan peternakan, akan tetapi seiring dengan menurunnya level penyebaran virus covid 19 target indikator Dinas Perikanan dan Peternakan mencapai target, bahkan melebihi dari target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan semangat para petani ternak dan pembudidaya ikan Kembali tumbuh seiring dengan permintaan pasar dan konsumsi masyarakat yang Kembali normal.

Kinerja Program pada Dinas Peternakan dan Perikanan tercermin dari terealisasinya tujuan dan sasaran Perangkat daerah pada Tahun 2021 mencapai target yang telah ditetapkan, tentunya kinerja program yang ada perlu di pertahankan agar tujuan dan sasaran perangkat daerah tetap terealisasi dengan baik.

isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang adalah semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi

lahan yang mengurangi keberadaan lahan pertanian/peternakan dan lahan budidaya perikanan akan berakibat menurunnya produksi dan produktivitas pertanian/peternakan dan perikanan. Mengingat sektor pertanian masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor khususnya dalam lingkup wilayah Jabodetabek, maka kondisinya yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor. Kondisi ini juga menuntut evaluasi terhadap keseriusan pelaksanaan Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Peraturan Bupati Bogor No.84 Tahun 2009 tentang. Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan yang mana Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan salah satu Dinas yang berpartisipasi langsung untuk keberhasilan program tersebut.

Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini. Polusi akibat aktivitas usaha peternakan merupakan isu yang seringkali muncul terutama pada lokasi peternakan yang berdekatan dengan pemukiman. Kontribusi senyawa metan yang berasal dari kotoran ternak terhadap pemanasan global juga perlu menjadi perhatian. Pada sektor perikanan dan peternakan, daya dukung lingkungan yang terkait dengan keberlanjutan usaha harus diperhatikan terutama ketersediaan lahan, sumberdaya pakan dan sumberdaya air, sehingga isu yang terkait dengan daya dukung lingkungan hendaknya dapat ditanggulangi.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Dinas Perikanan dan Peternakan perlu merancang berbagai rencana pembangunan Perikanan dan Peternakan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Dinas Perikanan dan Peternakan tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu

ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor dan lingkup pelayanannya.

Berdasarkan analisis SWOT diperoleh identifikasi terhadap masing-masing kondisi internal dan eksternal seperti yang disajikan dalam Tabel 3.a. Hasil identifikasi terhadap lingkungan internal dan eksternal tersebut selanjutnya digunakan untuk merancang strategi yang akan ditempuh selama lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Merujuk pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka arah kebijakan yang akan diterapkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan konsumsi Ikan;
2. Peningkatan produksi, nilai tambah produk dan Kelembagaan Kelompok peternakan;
3. Peningkatan Nilai tambah produk perikanan, Kelembagaan kelompok dan kerjasama dengan pihak luar baik swasta maupun perguruan tinggi;
4. Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis prioritas;
5. Peningkatan jaminan keamanan kesehatan produk Hewan;
6. Peningkatan status kesehatan hewan;
7. Penguatan Kelembagaan dan sumberdaya Kesehatan Hewan;
8. Peningkatan pelayanan perikanan dan peternakan.

Melalui Analisis SWOT dengan mempertimbangkan faktor lingkungan internal dan eksternal, diperoleh beberapa strategi yang

dapat digunakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat agar terciptanya *Produksi Perikanan dan Peternakan lokal bogor yang berdaya saing tinggi*.

a. Strategi S-O

1. Peningkatan Kualitas SDM dan akses Pengembangan usaha Sektor perikanan dan Peternakan
2. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait (Perguruan Tinggi, Badan Diklat, Lembaga Penelitian dan instansi terkait lainnya)
3. Meningkatkan daya saing produk yang kompetitif
4. Memacu investor dalam melakukan pengembangan usaha Perikanan dan Peternakan
5. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan usaha tani melalui pola kemitraan /koperasi
6. Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Balai Penelitian serta instansi terkait lainnya untuk meningkatkan penerapan teknologi tepat guna
7. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian usaha perikanan dan peternakan

b. Strategi W-O

1. Meningkatkan produksi dan olahan perikanan dan peternakan, kualitas dan kuantitas kelembagaan, serta sumberdaya manusia perikanan dan peternakan
2. Meningkatkan skala usaha perikanan dan peternakan dengan pendekatan agribisnis
3. Meningkatkan kerjasama usaha perikanan dan peternakan
4. Meningkatkan fasilitas usaha perikanan dan peternakan
5. Mengembangkan komoditas unggulan dan sentra-sentra produksi
6. Meningkatkan promosi usaha perikanan dan peternakan

c. Strategi S-T

1. Penanganan penyakit ternak dan zoonosis
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif
3. Menciptakan kerjasama untuk pemanfaatan lahan usaha secara produktif
4. Meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak dan ikan serta PAH dan HPAH

d. Strategi W-T

1. Optimalisasi sarana dan prasarana perikanan dan peternakan
2. Mengembangkan pemanfaatan sumber daya lokal
3. Meningkatkan kemampuan jiwa kewirausahaan pelaku usaha perikanan dan peternakan
4. Fasilitasi permodalan dan informasi pasar
5. Meningkatkan pembinaan pengolahan hasil perikanan dan peternakan
6. Meningkatkan pelayanan publik melalui pengusulan penambahan aparatur perikanan dan peternakan
7. Meningkatkan kualitas aparatur perikanan dan peternakan melalui pendidikan dan pelatihan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor mendukung 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu: Urusan Kelautan dan Perikanan dan Urusan Pertanian. Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatannya, Dinas Perikanan dan Peternakan tidak terlepas dari Visi dan Misi kedua lembaga tersebut.

A. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pembangunan perikanan Kabupaten Bogor yang berbasis perikanan budidaya bersinergi dengan kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya **Kementerian Kelautan dan Perikanan**. Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya**, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Memperkuat kemandirian kawasan dan pengelolaan sarana perikanan budidaya, dengan komponen kegiatan utama:
 - i. Mengembangkan Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari) dengan mendorong kemandirian kelompok yang memproduksi pakan mandiri dan mengembangkan bahan baku pakan lokal serta penyediaan sarana produksi pakan;
 - ii. Mengembangkan industri perbenihan nasional untuk pemenuhan kebutuhan induk dan benih bermutu secara mandiri dengan mengoptimalkan fungsi UPT dan UPTD serta unit pembenihan masyarakat;

- iii. Pengembangan kawasan perikanan budidaya (minapolitan) dengan mengintegrasikan rantai produksi dari hulu sampai hilir untuk efisiensi produksi;
 - iv. Pengembangan sarana input produksi inovatif (protein rekombinan, vaksin, enzim, probiotik, immunostimulan, rekayasa genetik, automatic feeder, karamba bulat, dll.);
 - v. Mendorong tumbuhnya industri penghasil sarana/peralatan/mesin perikanan budidaya di dalam negeri sesuai standar;
- b. Memperkuat kemandirian kelompok dan kelembagaan usaha perikanan budidaya, dengan komponen kegiatan utama:
- i. Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan sehingga menjadi kelompok yang mandiri;
 - ii. Penguatan akses permodalan usaha pembudidaya ikan skala kecil serta peningkatan minat investasi pembudidaya skala besar;
 - iii. Peningkatan kemitraan usaha perikanan budidaya/ *aquaculture incorporated*;

2. Meningkatkan daya saing dan potensi ekonomi sumberdaya perikanan budidaya, dilaksanakan dengan strategi:

- a. Meningkatkan daya saing produk perikanan budidaya, dengan komponen kegiatan utama:
 - i. Peningkatan kualitas induk dan benih melalui sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);
 - ii. Pelaksanaan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
 - iii. Modernisasi sistem pembudidaya ikan yang efektif dan efisien berbasis teknologi anjuran;
 - iv. Revitalisasi lahan marjinal dan ekstensifikasi;

- v. Peningkatan kapasitas prasarana (infrastruktur) perikanan budidaya yang efisien;
 - vi. Pengembangan Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (Posikandu) dalam rangka pencegahan (vaksinasi) dan *Early Warning System* penyakit di sentra-sentra produksi budidaya;
 - vii. Modernisasi sistem produksi pembudidayaan ikan mendukung industrialisasi;
 - viii. Pengembangan komoditas unggulan (*driven market commodity*);
 - ix. Segmentasi usaha perikanan budidaya.
- b. Peningkatan potensi ekonomi perikanan perikanan budidaya
- i. Pengembangan industrialisasi marikultur secara intensif dan berkelanjutan;
 - ii. Peningkatan kuantitas dan kualitas ikan non konsumsi (ikan hias, karang buatan, tanaman hias dll);
 - iii. Pengembangan sentra budidaya baru dengan percontohan kawasan/klaster;
3. Pelestarian dan keberlanjutan sumberdaya perikanan budidaya, akan dilaksanakan melalui strategi penataan pengelolaan budidaya ikan berkelanjutan, dengan komponen kegiatan:
- i. Penerapan teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan dan sesuai dengan daya dukung;
 - ii. Pengembangan *Culture Based Fisheries* (CBF) dengan pendekatan komoditas *multi-trophic level*.
 - iii. Penerapan IMTA (*Integrated Multi Trophic Aquaculture*);
 - iv. *Backyard Aquaculture* (budidaya di pekarangan) dan pemanfaatan lahan marginal;

- v. Pengembangan komoditas ikan spesifik lokal unggulan dan species ikan tahan perubahan lingkungan;
- vi. Pengembangan minapadi komoditas ekonomis (ugadi, ugamed, ugaladi).
- vii. Pengendalian plasma nutfah induk dan benih;
- viii. Rehabilitasi lingkungan sentra produksi perikanan budidaya (waduk, danau, lingkungan tambak/ *silvo fisheries*).

Disamping arah kebijakan dan pelaksanaan strategi di atas, pada periode 2015-2019 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya juga diberikan mandat untuk melaksana quickwins dan program lanjutan. Quickwins merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

B. Kementerian Pertanian

Sedangkan sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam kurun waktu 2019-2023 arah kebijakan yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengacu kepada arah kebijakan jangka menengah pembangunan pertanian nasional. Kebijakan pembangunan pertanian tersebut adalah mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Kementerian Pertanian telah menetapkan 8 tahapan menuju pertanian industri. Tahapan periode tahun 2019-2023 dirumuskan untuk kokohnya pondasi bioindustri yang berkelanjutan, sehingga pada tahun 2045 yaitu tahapan akhir

pertanian bioindustri, dapat terwujud tahapan pertanian Indonesia bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur.

Mengacu pada rumusan di atas, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada 2019-2023 menetapkan arah kebijakan Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak mendukung kokohnya pondasi bioindustri yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak langkah yang akan ditempuh pembangunan pertanian adalah (i) menjadikan komoditas ekspor, penyedia bahan baku bioindustri dan bio energy dengan pendekatan kawasan, (ii) meningkatkan kualitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian, (iii) menyediakan prasarana dan sarana dasar pertanian, (iv) memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani, dan (v) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan pertanian maka **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan** merumuskan strategi untuk pemenuhan pangan asal ternak dan pembangunan agribisnis peternakan rakyat sebagai berikut:

1. Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik lokal

Indonesia memiliki sumber daya plasma nutfah yang merupakan sumber daya genetic lokal yang berlimpah. Oleh karena itu pelestarian dan pemanfaatannya melalui berbagai program konversi dan pemuliabiakan harus terus dilanjutkan dan menjadi strategi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Untuk melindungi sumber daya genetic lokal pemerintah telah menyusun pelestarian dan pemanfaatan ternak lokal yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu: ternak asli sapi yang meliputi 6 rumpun, kerbau 6 rumpun asli, kambing 5 rumpun, domba 6 rumpun, ayam 7 rumpun, itik 13 rumpun

dan kuda 1 rumpun asli. Pemerintah akan mengatur dari sisi konsumsi ternak tersebut dan pelestariannya.

2. Penguatan kawasan dan kelembagaan peternakan

Pemerintahan Jokowi JK telah memutuskan untuk membangun dari pinggiran. Oleh karena itu fokus pembangunan peternakan dan kesehatan hewan diarahkan kepada pembangunan kawasan. Telah diputuskan terdapat 100 kawasan pengembangan sapi potong, 13 kawasan pengembangan kebau, 11 kawasan pengembangan kambing, 6 kawasan pengembangan sapi perah, 5 kawasan pengembangan domba dan 9 pengembangan kawasan babi diberbagai kabupaten/kota di Indonesia. Pengembangan kawasan akan memperkuat kelembagaan peternakan dan kesehatan hewan yang diharapkan dapat memperkuat simpul-simpul pelayanan teknis pelayanan ekonomi lainnya.

3. Penguatan infrastruktur dan pelayanan teknis

Penguatan infrastruktur dan peningkatan pelayanan teknis merupakan menjadi dua hal yang saling mendukung. Pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan menjadi optimal apabila ada infrastrukturnya. Oleh karena itu dalam hal pelayanan teknis melalui fungsi-fungsi pembangunan peternakan dan keswan yaitu pelayan perbibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen masing-masing memerlukan infrastruktur sesuai dengan fungsinya.

Pelayanan fungsi-fungsi peternakan sangat memerlukan adanya unit pelayanan teknis yang dapat menjangkau sampai ditingkat lapangan. Oleh karena itu dalam kurun waktu 5 tahun mendatang diperlukan penguatan UPT baik UPT pusat maupun UPT daerah. Ditingkat lapangan juga akan diperkuat infrastruktur pelayanan fungsi yaitu pendirian *village breeding center*, lumbung pakan, puskesmas, pos

IB, sampai kepada sarana padang penggembalaan terutama di wilayah timur Indonesia.

4. Pemberdayaan Peternakan dan Daya Saing

Pemberdayaan peternak sesuai yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2013 bahwa pemberdayaan peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan Peternak. Dengan demikian pemberdayaan peternak mencakup daya saingnya. Untuk ini akan dibuka akses dan kemudahan peternak terhadap sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.

5. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas (kualitas) SDM peternakan dan kesehatan hewan

Angkatan kerja peternakan dan kesehatan hewan menunjukkan kecenderungan yang semakin menua. Hal tersebut menunjukkan bahwa lapangan usaha peternakan dan kesehatan hewan mulai tidak menarik bagi generasi muda. Data sakernas menunjukkan bahwa tenaga kerja subsektor peternakan pada tahun 2013 didominasi oleh tenaga kerja laki-laki sebanyak lebih dari 2,4 juta orang (58,7%) sedangkan komposisi tenaga kerja perempuan lebih dari 1,7 juta orang (41, 3%) pada umumnya tenaga kerja perempuan berpendidikan SD masih cukup dominan.

Data sakernas menunjukkan juga bahwa lebih dari 1,6 juta orang (37,1%) berpendidikan SD. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan

penguatan kapasitas SDM peternakan dan kesehatan hewan menjadi kunci dari strategi lainnya. Upaya peningkatan tersebut dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal. Melalui program pemerintah selalu terkait di dalamnya untuk peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas SDM.

6. Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyadari bahwa penerapan teknologi merupakan faktor terpenting untuk peningkatan produksi dan produktivitas ternak. Saat ini tingkat kematian, angka kesakitan, penambahan berat badan, lamanya *calving interval* dan masalah kurangnya pakan pada musim kemarau dan masih lemahnya penataan pemotongan ternak (TPH) disadari dapat dipecahkan dengan penerapan teknologi dibidang pembibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner melalui teknologi dan bioteknologi. Penerapan teknologi dapat ditempuh dengan melakukan kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Demikian juga untuk sistem informasi akan ditempuh mengikuti perkembangan yang berbasis computer, antara lain: dibidang perencanaan sudah mulai diterapkan *eplanning* dan bidang pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement*. Di bidang teknis pelayanan dikembangkan sms gateway untuk pemotongan ternak dan ISIKHNAS untuk kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, menjadi bagian *e-government*.

7. Penguatan Regulasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam hal regulasi penguatan akan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan. Sebagai turunannya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah banyak menyusun Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pertanian. Sesuai dengan perkembangan, berbagai peraturan tersebut akan mengalami penambahan, revisi, atau pencabutan.

8. Mendorong insentif peternakan

Mendorong insentif peternakan akan dilakukan ditngkat peternak maupun badan usaha berbentuk koperasi, BUMN, BUMD dan Perusahaan. Insentif dapat diberikan dalam pemberian bantuan modal khususnya kepada peternak sasaran, pembebasan bea masuk untuk bibit, pembebasan pajak dan berbagai kemudahan lainnya untuk menarik investasi. Diakui bahwa investasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan realisasinya masih rendah tidak sesuai harapan. Dalam rangka menuju kemandirian dan keamanan pangan menuju bioindustri peternakan dan kesehatan hewan maka berbagai bentuk insentif akan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundangan. Insentif mengandung arti “perlindungan” terhadap petani peternak dan sumber daya lokal. Oleh karena itu bentuk-bentuk insentif ini akan berbeda dengan untuk korporasi.

9. Perbaiki Tata Niaga Ternak dan Produk Ternak

Mata rantai yang panjang komoditas ternak dan produknya sudah lama disadari. Tata niaga ternak potong yang sangat panjang dari wilayah produsen ternak di NTB, NTT, dan Sulawesi Selatan ke Jakarta sebagai wilayah konsumen menyebabkan peternak menerima *margin* keuntungan yang kecil dibandingkan pedagang, distributor dan pengecer. Untuk peternakan unggas khususnya ayam ras masalah tata niaga dan pemasaran produknya terjadi sebagai akibat pertentangan antara peternak mandiri, kemitraan dan perusahaan. Perusahaan cenderung mengusahakan dalam usaha yang terintegrasi sehingga

usahanya menjadi lebih efisien. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan meningkatkan koordinasi lintas sektor khususnya dengan Kementerian terkait. Dengan Kementerian Perhubungan terus dijajaki adanya pengadaan kapal ternak untuk lebih meningkatkan pendapatan peternak di daerah produsen sebagai akibat berkurangnya kerugian pasca panen. Selain itu di daerah-daerah produsen ternak akan dibangun rumah potong hewan (RPH) modern sehingga angkutan ternak digantikan oleh mata rantai dingin untuk mengurangi perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah *animal welfare*. Dengan Kementerian Perdagangan terus akan dilakukan kerjasama dalam bentuk tim misalnya tim harga agar harga tidak naik dan menyesuaikan dengan *supply* ternak lokal.

Secara umum Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor telah searah dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Rencana Strategis Kementrian Pertanian RI. Dengan demikian penjabaran RENSTRA dalam bentuk Program dan Kegiatan diharapkan akan sejalan dengan kepentingan nasional.

Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Sebagai bentuk tindak lanjut rencana pembangunan nasional maka Provinsi Jawa Barat pun menyusun arah pembangunannya sejalan dengan yang digariskan pemerintah pusat. Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 yaitu **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”** dan dijabarkan dalam 5 (lima) misi, yaitu:

- Misi 1 : Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban
- Misi 2 : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif
- Misi 3 : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023
- Misi 4 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
- Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Terdapat 5 (lima) isu strategis dalam pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;
2. Kemiskinan, Pengangguran, dan masalah social;
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; serta
5. Reformasi Birokrasi.

Sedangkan prioritas pembangunan daerah Jawa Barat 2018-2023 menjadi 9 prioritas, yaitu:

1. Akses pendidikan untuk semua;
2. Desentralisasi peelayanan kesehatan;
3. Pertumbuhan ekonomi uat berbasis inovasi;
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata;
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara;
6. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah pengelolaan lingkungan hidup;
7. Gerakan membangun desa (Gerbang Desa);
8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (Golekmah); dan
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Kebijakan operasional pembangunan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018-2023 adalah:

1. Melanjutkan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah selesai untuk selanjutnya dimanfaatkan dan direplikasi ke berbagai daerah;
2. Menuntaskan program-program yang sudah baik dan sudah dimulai dilaksanakan namun belum selesai untuk segera dapat dimanfaatkan;
3. Memberi dukungan, pada program-program pembangunan yang dilakukan langsung oleh komunitas berbasis masyarakat, akademisi dan institusi pendidikan/riset serta dunia usaha;
4. Reposisi dengan menerapkan strategi baru untuk program-program pembangunan yang sudah baik namun belum bisa dilaksanakan pembangunannya karena mengalami hambatan;
5. Melakukan reorientasi dengan menyusun program-program baru bersifat terobosan, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan

pembangunan yang perlu segera dilaksanakan bersama bupati dan walikota dengan dukungan dari pemerintah pusat.

Pembangunan perikanan dan peternakan termasuk dalam isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa upaya yang akan dilakukan diantaranya: (1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dan Perikanan, dan (2) Ketahanan Pangan. Pembangunan perikanan dan peternakan termasuk dalam target *Common Goals* Tematik Sektoral; Meningkatkan Ekonomi Pertanian dengan sasaran:

1. Jawa Barat sebagai sentra produksi benih/bibit nasional;
2. Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry;
3. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani;
4. Jawa Barat bebas rawan pangan;
5. Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan.

Sedangkan dalam Pembangunan Tematik Sektoral, Kabupaten Bogor yang tergabung dalam zona pengembangan wilayah I diarahkan untuk (1) Pengembangan sentra ternak sapi potong, sapi perah, ayam ras dan unggas lokal, dan (2) Pengembangan agribisnis ikan air tawar, dan ikan hias untuk pasar regional dan global.

Secara ringkas identifikasi kebijakan nasional dan propinsi terkait dengan pembangunan perikanan dan peternakan di Kabupaten Bogor dapat dilihat dalam Tabel 3.1 dan table 3.2

Tabel 3.1 Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLAK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Total hasil tangkapan ikan di perairan umum	110	Ton	724.701.706
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Kontribusi Produksi Benih Ikan terhadap target total	33.67	%	7.114.551.157
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terjaminnya usaha budidaya dan penangkapan di perairan umum yang berkelanjutan	Persentase Usaha Perikanan Budidaya dan Tangkap di Perairan Umum	44.44%	%	330.212.218
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	Jumlah Total Jumlah Produksi Olahan Perikanan	17,524	Ton	1.807.470.908
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Terpenuhinya sarana Pertanian (Pternakan)	persentase Keterpenuhan sarana Pternakan (bibit ternak)	44.41	%	7.418.189.254
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terpenuhinya infrastruktur pertanian (peternakan)	persentase Keterpenuhan prasarana (infrastruktur) Pternakan	38.89	%	2.322.101.257

		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	menurunnya resiko bencana akibat zoonosis	Jumlah penyakit yang dikendalikan	32.55	%	90.000.149
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pengendalian dan penanganan penyakit hewan menular	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular	70	%	2.783.195.671
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian (usaha peternakan, izin usaha obat hewan di tingkat pengecer)	Persentase Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pertanian (usaha peternakan, izin usaha obat hewan di tingkat pengecer)	40	%	75.956.647
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok (penyuluhan) peternakan	persentasi kenaikan kelas kelompok	25	%	317.536.437
	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	100	%	25.597.770.503
					TOTAL		48.581.685.907

Tabel 3.2 Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2023

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME	TARGET			
			TOLAK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
1	Pemulihan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Total hasil tangkapan ikan di perairan umum	110	Ton	724.701.706
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Kontribusi Produksi Benih Ikan terhadap target total	33.67	%	7.114.551.157
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terjaminnya usaha budidaya dan penangkapan di perairan umum yang berkelanjutan	Persentase Usaha Perikanan Budidaya dan Tangkap di Perairan Umum	44.44%	%	330.212.218
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	Jumlah Total Jumlah Produksi Olahan Perikanan	17,524	Ton	1.807.470.908
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Terpenuhinya sarana Pertanian (Pternakan)	persentase Keterpenuhan sarana Pternakan (bibit ternak)	44.41	%	7.418.189.254
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terpenuhinya infrastruktur pertanian (peternakan)	persentase Keterpenuhan prasarana (infrastruktur) Pternakan	38.89	%	2.322.101.257

	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	menurunnya resiko bencana akibat zoonosis	Jumlah penyakit yang dikendalikan	32.55	%	90.000.149
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pengendalian dan penanganan penyakit hewan menular	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular	70	%	2.783.195.671
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian (usaha peternakan, izin usaha obat hewan di tingkat pengecer)	Persentase Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pertanian (usaha peternakan, izin usaha obat hewan di tingkat pengecer)	40	%	75.956.647
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok (penyuluhan) peternakan	persentasi kenaikan kelas kelompok	25	%	317.536.437
Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	100	%	25.597.770.503
				TOTAL		48.581.685.907

Tabel 3.3 Dukungan Terhadap arah kebijakan nasional

NO	ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLAK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
1	Transformasi Ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Total hasil tangkapan ikan di perairan umum	110	Ton	724.701.706
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Kontribusi Produksi Benih Ikan terhadap target total	33.67	%	7.114.551.157
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terjaminnya usaha budidaya dan penangkapan di perairan umum yang berkelanjutan	Persentase Usaha Perikanan Budidaya dan Tangkap di Perairan Umum	44.44%	%	330.212.218
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	Jumlah Total Jumlah Produksi Olahan Perikanan	17,524	Ton	1.807.470.908
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Terpenuhinya sarana Pertanian (Peternakan)	persentase Keterpenuhan sarana Peternakan (bibit ternak)	44.41	%	7.418.189.254
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terpenuhinya infrastruktur pertanian (peternakan)	persentase Keterpenuhan prasarana (infrastruktur) Peternakan	38.89	%	2.322.101.257

		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	menurunnya resiko bencana akibat zoonosis	Jumlah penyakit yang dikendalikan	32.55	%	90.000.149
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pengendalian dan penanganan penyakit hewan menular	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular	70	%	2.783.195.671
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian (usaha peternakan, izin usaha obat hewan di tingkat pengecer)	Persentase Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pertanian (usaha peternakan, izin usaha obat hewan di tingkat pengecer)	40	%	75.956.647
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok (penyuluhan) peternakan	persentasi kenaikan kelas kelompok	25	%	317.536.437
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	100	%	25.597.770.503
					TOTAL		48.581.685.907

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan dan Peternakan

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor secara fungsional memiliki fungsi dan peranan sebagai lembaga yang tidak hanya menjabarkan kebijakan daerah, akan tetapi harus menjabarkan pula kebijakan pembangunan yang telah digariskan secara nasional. Tujuan penyusunan Renja adalah menuangkan rencana kerja dinas dalam bentuk program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Dalam kaitan tersebut, maka Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor telah menetapkan tujuan dan sasaran kinerja untuk tahun 2023 sebagaimana dijabarkan dalam tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023

URAIAN	TOLAK UKUR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
				4	
TUJUAN					
Meningkatkan ketersediaan produk perikanan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya produksi perikanan	1. Total Produksi Perikanan	Produksi Perikanan = Jumlah Produksi ikan A + Ikan B + jumlah produksi olahan ikan + dst	Ton	147,159.00
	Meningkatnya produksi peternakan	2. Total Produksi Peternakan	Produksi Perikanan = Jumlah Produksi Daging + Telur + Susu	Ton	393,830.00
SASARAN					
1. Meningkatnya jumlah benih ikan	Meningkatnya benih ikan konsumsi	1. Jumlah Benih Ikan konsumsi	Jumlah Benih Ikan = Jumlah Benih ikan A + Benih Ikan B + dst	RE	5,886,220
2. Jumlah Populasi Ternak	Meningkatnya populasi ternak	2. Jumlah Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak = Jumlah Ternak A + Ternak B + dst	Ekor	40,181,541

3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan dan sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Bogor.

Kabupaten Bogor memiliki sumberdaya alam yang cukup besar. Salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah pertanian. Selain potensi produksi tanaman pangan, produksi tanaman perkebunan dan produksi perikanan air tawar dapat dilihat dari luasan sawah produktif, perkebunan dan kawasan perikanan. Tentunya hal tersebut adalah faktor yang mendukung dilaksanakannya program, kegiatan dan Sub. kegiatan pada Dinas Perikanan dan Peternakan. Pemerintah Kabupaten Bogor sangat memperhatikan pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan pada khususnya melalui kebijakan Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan (RP3) yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Pertanian.

Selain meningkatkan produksi, tujuan pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan juga diarahkan agar dilakukan secara efektif dan efisien serta mempunyai daya jual yang tinggi atau mempunyai daya saing yang tinggi sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2010 tentang Peningkatan Daya Saing Produk Kabupaten Bogor.

Budidaya perikanan air tawar baik untuk produksi ikan konsumsi, pembibitan maupun ikan hias mampu menjadi tumpuan pemenuhan kebutuhan akan ikan konsumsi, bibit ikan dan ikan hias di Kabupaten Bogor.

Adapun uraian mengenai komoditas unggulan sektor perikanan dan peternakan di setiap kecamatan adalah sebagai berikut :

- Komoditas ikan lele terutama dikembangkan di Kawasan Minapolitan, meliputi Kecamatan Ciseeng, Parung, Gunung Sindur dan Kemang.
- Komoditas ikan mas merupakan unggulan yang dikembangkan di Kecamatan Pamijahan, Cibungbulang dan Leuwiliang.
- Komoditas gurame merupakan unggulan yang dikembangkan di Dramaga dan Bojonggede, daerah potensial lainnya adalah Kecamatan Parung.
- Komoditas ikan hias air tawar diarahkan di Kecamatan Cibinong, Ciseeng, dan Ciampea, dengan lokasi pengembangan di Kecamatan Parung.
- Komoditas sapi perah yang sentranya terletak di Kecamatan Cisarua dan Megamendung, dengan wilayah pengembangan di Kecamatan Pamijahan, Cibungbulang dan Cijeruk.
- Komoditas sapi potong sentra komoditas unggulannya terdapat di Kecamatan Jonggol dan Cariu, dengan daerah pengembangannya di Kecamatan Tanjungsari.

Rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2023 dituangkan dalam tabel 3.5 sebagaimana terlampir.

Tabel 3.5 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

BIDANG / BAGIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
Bidang Produksi Perikanan	3	9	16	8.169.465.081
Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	1	4	5	1.807.470.908
Bidang Peternakan	3	8	9	10.110.794.792
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3	13	18	2.896.184.623
Sekretariat	1	8	33	25.597.770.503
TOTAL	11	42	81	48.581.685.907

3.4 Dukungan Terhadap Pencapaian Target Pancakarsa

Pancakarsa merupakan kinerja strategis Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2018-2023, sehingga menjadi target strategis yang perlu dituntaskan hingga akhir periode. Target Pancakarsa Dinas Perikanan dan PEternakan dijabarkan sebagaimana tabel 3.6 terlampir.

Tabel 3.6. Target Pancakarsa Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023

Indikator Pancakarsa	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub-Sub Kegiatan	Target		
					Volume	Satuan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
Bogor Maju	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Budidaya Perikanan Petani Milenial (Pemberian Dempond)	60	Orang	251,675,831
	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Bimbingan Teknis Petani Milenial Sektor Peternakan Kursus Tani Ternak	50	Orang	510,978,202

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional, Provinsi dan prioritas Dinas Perikanan dan Peternakan untuk pemenuhan pelayanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Rencana kerja Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2023 diarahakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Jumlah pagu indikatif yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Tahun 2023 yang adalah sebesar Rp. 48.581.685.907,-. Jumlah pagu indikatif yang tercantum dalam rencana kerja ini masih jauh dari kata ideal untuk menjalankan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan, namun besaran anggaran ini disesuaikan dengan kondisi pendapatan daerah Kabupaten Bogor yang masih terkena dampak Pandemi Covid 19. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan serta prakiraan maju tahun 2024 disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini:

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan perangkat daerah yang wajib disusun setiap tahun, sekaligus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RKPD tahun 2023, dan termuat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Renja Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan pedoman dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan.

Selanjutnya, dalam rangka merinci pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan rencana anggaran, dokumen Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perikanan dan Peternakan yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023.

Plt. BUPATI BOGOR,

IWAN SETIAWAN

					01	Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	bahan Sosialisasi penerbitan izin usaha perikanan		2 Jenis	56.758.525	-	-	2 Jenis	14.302.542	2	14.273.950	100,00	99,80	2	14.273.950			Sie Budidaya Ikan		
3	25	04	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terfasilitasinya layanan sosialisasi penerbitan izin usaha perikanan budidaya		40 Kec	1.459.005.908	-	-	40 Kec	367.467.474	40	366.411.210	100,00	99,71	40	366.411.210			Sie Budidaya Ikan		
					01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Bantuan Sarana P2MKP		3 Jenis	882.900.343	-	-	4 Jenis	341.460.130	4	340.657.710	100,00	99,77	4	340.657.710			Sie Budidaya Ikan		
																						0,00			
					02	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kaji Terap Perikanan Budidaya		3 Kali	576.105.565	-	-	1 Kali	26.007.344	1	25.753.500	100,00	99,02	1	25.753.500	100,00	99,02	Sie Budidaya Ikan		
																						0,00			
3	25	04	2.03			Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya tanda daftarnya tanda daftarnya pembudidayaan ikan kecil bagi para pelaku usaha perikanan		4 Kali	49.875.760	-	-	1 Kali	11.725.603	1	9.320.500	100,00	79,49	1	9.320.500	100,00	79,49	Sie Budidaya Ikan		
					01	Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan bahan publikasi TDPIK		1 Jenis	49.875.760	-	-	1 Jenis	11.725.603	1	9.320.500	100,00	79,49	1	9.320.500	100,00	79,49	Sie Budidaya Ikan		
3	25	04	2.04			Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terfasilitasinya kebutuhan sarana prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan		3 Tahun	15.137.015.574	-	-	1 Tahun	2.933.179.002	1	2.875.594.099	100,00	98,04	1	2.875.594.099	100,00	98,04	Sie Budidaya Ikan		
					01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan data perikanan budidaya		1 Dokumen	371.323.385	-	-	1 Dokumen	93.849.303	1	93.010.000	100,00	99,11	1	93.010.000	100,00	99,11	Sie Budidaya Ikan		
					02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Hatcery di TTP Cigombong (DAK)		1 paket	607.955.000	-	-	1 paket	589.202.000	1	589.057.000	100,00	99,98	1	589.057.000	100,00	99,98	Sie Budidaya Ikan		
							Pengadaan sarana budidaya perikanan		5 Jenis				5 Jenis		5					5		0,00	0,00		

						Persentase Usaha Perikanan Budidaya dan Tangkap di Perairan Umum																			
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Usaha Perikanan Budidaya dan Tangkap di Perairan Umum	44,44	%	1.118.836.617	-	-	22,22	%	234.480.769	22,22	230.334.599	100,00	98,23	22,22	230.334.599	100,00	98,23	Bidang Perikanan		
3	25	05	2.01		Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah usaha perikanan tangkap dan budidaya yang diawasi	90	Pelaku usaha	1.118.836.617	-	-	20	Pelaku usaha	234.480.769	4	230.334.599	#DIV/0!	98,23	4	230.334.599	#DIV/0!	98,23	<i>Sie Prasarana Kawasan Perikanan</i>		
				01	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan budidaya ikan di perairan umum	40	Lokasi	540.494.948	-	-	16	lokasi	101.955.539	16	100.020.894	100,00								
						Pengawasan penggunaan OIKB untuk budidaya Ikan di Perairan Umum	40	lokasi																	
						Pengawasan penyebaran ikan, ikan invasif dan pembudidayaan di perairan umum	40	lokasi																	
				02	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan penangkapan ikan dan penyebaran ikan non Lokal, invasif serta berbahaya di perairan umum	40	lokasi	578.341.669	-	-	14	lokasi	132.525.230	14	130.313.705			14	130.313.705	0,00	0,00			
						Pengawasan Penguunaan alat tangkap ikan di perairan umum		lokasi				7	lokasi		7										
						pengawasan penggunaan obat ikan, kimia dan biologi untuk penangkapan ikan di perairan umum		lokasi				4	lokasi	Olahan Perikanan	4										
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Total Jumlah Produksi Olahan Perikanan	17.524	Ton	5.473.453.149	-	-	16359	Ton	<i>1.367.611.041</i>	16.373,91	1.351.998.703	100,09	98,86	16.374	1.351.998.703	100,09	98,86	Bidang Penguatan Daya saing Produk Perikanan		
3	25	06	2.01		Kegiatan: Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	5	Paket	775.091.306	-	-	1	Paket	240.595.304	1	237.894.936	100,00	98,88	1	237.894.936	100,00	98,88	<i>Sie Pelayanan usaha dan permodalan Perikanan</i>		
				01	Sub Kegiatan: Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Buku Saku Data Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	5	Buku	775.091.306	-	-	5	Buku	240.595.304	5	237.894.936	100,00	98,88	5	237.894.936	100,00	98,88	<i>Sie Pelayanan usaha dan permodalan Perikanan</i>		

							Evaluasi produk Kartu KUSUKA	2 Kali	-	-	-	2 Kali		2			2	-	0,00	0,00			
							Promosi produk olahan perikanan	16 Kali	-	-	-	16 Kali		16			16	-	0,00	0,00			
							Sinkronisasi Data Pemasaran dan Pengolahan Perikanan	2 Kali	-	-	-	2 Kali		2			2	-	0,00	0,00			
							Temu Usaha Pelaku Usaha Perikanan	1 Kali	-	-	-	1 Kali		1			1	-	0,00	0,00			
3	25	06	2.02				Kegiatan: Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	0 Kali	720.429.676	-	-	14 Kali	139.176.462	8	132.591.869	57,14	95,27	8	132.591.869	57,14	95,27	Sie Bina Mutu dan pengolahan hasil perikanan	
				01			Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	12 Kali	720.429.676	-	-	12 Kali	139.176.462	9	132.591.869	73,00	95,27	9	132.591.869	73,00	95,27	Sie Bina Mutu dan pengolahan hasil perikanan	
							Diseminasi Olahan hasil perikanan	25 Orang		-	-	25 Orang		25									
							Pembinaan pelaku usaha, pengawasan mutu dan pendataan bahan asal ikan	16 Kecamatan		-	-	16 Kecamatan		8				8	-	0,00	0,00		
							Sosialisasi Gemar Makan ikan	500 Orang		-	-	500 Orang		200									
							Sosialisasi PMMT	25 Orana		-	-	25 Orana		25									
3	25	06	2.03				Kegiatan: Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0 Paket	3.977.932.167	-	-	10 Paket	987.839.275	10	981.511.898	100,00	99,36	10	981.511.898	100,00	99,36	sie Pengembangan Usaha dan SDM Perikanan	
				01			sub Kegiatan: Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Kali	570.584.403	-	-	2 Kali	172.951.117	2	171.144.936	100,00	98,96	2	171.144.936	100,00	98,96		
							Pertemuan Suplier Ikan Konsumsi	2 Kali		-	-	1 Kali		1				1	-	0,00	0,00		
							Pertemuan Suplier Olahan Ikan	2 Kali		-	-	1 Kali		1				1	-	0,00	0,00		
							Pelatihan Branding Produk	2 Kali		-	-	- Kali		-				-	-	0,00	0,00		
				02			Sub Kegiatan: Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 KPM	686.201.955	-	-	5 KPM	275.843.120	5	275.771.250	100,00	99,97	5	275.771.250	100,00	99,97	sie Pengembangan Usaha dan SDM Perikanan	
							Pelatihan Peserta PKH	15 Kali		-	-	1 Kali		1				1	-	0,00	0,00		
							UPT SARANA USAHA	0		-	-							-	-	0,00	0,00		
				02			Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	2.721.145.809	-	-	1 Tahun	539.045.038	1	534.595.712	100,00	99,17	1	534.595.712	100,00	99,17	sie Pengembangan Usaha dan SDM Perikanan	
3	25	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	66.697.567.911	-	-	100 %	22.485.857.823	100	22.207.457.001	100,00	98,76	100	22.207.457.001	100,00	98,76	Sekretariat

3	25	01	2.01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	16	Dok	1.077.268.255	-	-	2	Dok	216.641.850	2	210.913.600	100,00	97,36	2	210.913.600	100,00	97,36	SubBagProlap	
			01	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2	Dok	252.774.775	-	-	2	Dok	31.671.800	2	30.811.100	100,00	97,28	2	30.811.100	100,00	97,28	SubBagProlap	
			02	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	2	Dok	39.419.450	-	-	2	Dok	3.250.000	2	3.050.000	100,00	93,85	2	3.050.000	100,00	93,85	SubBagProlap	
			03	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	2	Dok	36.183.975	-	-	2	Dok	8.600.000	2	8.250.000	100,00	95,93	2	8.250.000	100,00	95,93	SubBagProlap	
			04	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	2	Dok	43.244.025	-	-	2	Dok	14.122.000	2	13.911.000	100,00	98,51	2	13.911.000	100,00	98,51	SubBagProlap	
			05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	2	Dok	34.666.050	-	-	2	Dok	4.123.050	2	3.731.500	100,00	90,50	2	3.731.500	100,00	90,50	SubBagProlap	
			06	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Pelaksanaan Program kegiatan	3	Jenis	201.639.915	-	-	3	Jenis	67.000.000	3	63.696.000	100,00	95,07	3	63.696.000	100,00	95,07	SubBagProlap	
					Pembayaran jasa tenaga kontrak Pemda	60	Bulan	-	-	-	12	Bulan	-	12	-	-	-	12	-	0,00	0,00	SubBagProlap	
			07	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja program kegiatan Perangkat daerah Publikasi Kinerja	60	Bulan Tahun	469.340.065	-	-	12	Bulan Tahun	87.875.000	12	87.464.000	100,00	99,53	12	87.464.000	100,00	99,53	SubBagProlap	
3	25	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan perangkat daerah tersusun	100	%	53.097.869.854	-	-	100	%	19.060.808.167	100	18.920.464.816	100,00	99,26	100	18.920.464.816	100,00	99,26	SubBagKeuangan	
			01	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	52.931.159.209	-	-	12	Bulan	19.000.357.217	12	18.864.662.036	100,00	99,29	12	18.864.662.036	100,00	99,29	SubBagKeuangan	
			02	Sub Kegiatan: Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan	33.939.220	-	-	12	Bulan	11.541.500	12	10.372.800	100,00	89,87	12	10.372.800	100,00	89,87	SubBagKeuangan	
			03	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan keuangan perangkat daerah	1	Dok	27.718.935	-	-	1	Dok	11.500.750	1	10.885.350	100,00	94,65	1	10.885.350	100,00	94,65	SubBagKeuangan	
			04	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Akhir keuangan perangkat daerah	1	Dok	31.167.365	-	-	1	Dok	12.802.750	1	12.320.830	100,00	96,24	1	12.320.830	100,00	96,24	SubBagKeuangan	
			05	Sub Kegiatan: Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan Tanggapan Pemeriksaan	1	Dok	20.165.895	-	-	1	Dok	8.396.250	1	7.737.850	100,00	92,16	1	7.737.850	100,00	92,16	SubBagKeuangan	
			06	sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	1	Dok	31.313.625	-	-	1	Dok	9.218.100	1	8.022.900	100,00	87,03	1	8.022.900	100,00	87,03	SubBagKeuangan	
			07	Sub Kegiatan: Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan dan prognosis anggaran	1	Dok	22.405.605	-	-	1	Dok	6.991.600	1	6.463.050	100,00	92,44	1	6.463.050	100,00	92,44	SubBagKeuangan	
3	25	01	2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	100	%	275.308.078	-	-	100	%	101.325.682	100	100.990.704	100,00	99,67	100	100.990.704	100,00	99,67	SubBagUmpeg	
			01	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengelolaan barang milik daerah	1	PD	275.308.078	-	-	1	PD	101.325.682	1	100.990.704	100,00	99,67	1	100.990.704	100,00	99,67	SubBagUmpeg	

3	25	01	2.04	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	100	%	670.599.848	-	-	100	%	122.084.654	100	118.690.769	100,00	97,22	100	118.690.769	100,00	97,22	SubBAGUmpeg	
			01	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pengadaan Pakaian Olahraga	0		141.036.865	-	-								-	-	0,00	0,00	SubBAGUmpeg	
			02	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pengajian Rutin Senam Pagi bersama	12	Bulan Bulan	348.828.329	-	-	12	Bulan Bulan	122.084.654	12	118.690.769	100,00	97,22	12	118.690.769	100,00	97,22	SubBAGUmpeg	
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				180.734.654															
3	25	01	2.05	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	100	%	3.665.692.292	-	-	100	%	924.740.755	100	913.434.025	100,00	98,78	100	913.434.025	100,00	98,78	SubBAGUmpeg	
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan alat listrik elektronik kebutuhan dinas	19	Jenis	119.943.081	-	-	19	Jenis	49.811.000	19	48.949.500	100,00	98,27	19	48.949.500	100,00	98,27	SubBAGUmpeg	
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kursi Kerja	10	Unit	1.433.829.725	-	-	5	Unit	461.217.100	5	456.797.800	100,00	99,04	5	456.797.800	100,00	99,04	SubBAGUmpeg	
					Pengadaan Dispenser	3	Unit		-	-	6	Unit		6									
					Pengadaan Komputer Desktop	15	Unit		-	-	6	Unit		6									
					Pengadaan Lampu Emergency	6	Buah		-	-	4	Buah		4									
					Pengadaan Lemari Arsip	10	Unit		-	-	16	Unit		16									
					Pengadaan Mesin Fax	1	Unit		-	-	2	Unit		2									
					Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	3	Unit		-	-	6	Unit		6									
					Pengadaan Notebook	20	Unit		-	-	12	Unit		12									
					Pengadaan Printer	9	Unit		-	-	12	Unit		12									
					Pengadaan Tangga Linat	2	Buah		-	-	2	Buah		2									
			03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	APD pemulihan pandemi corona Penyediaan peralatan dan bahan pembersih	39	Jenis	351.144.040	-	-	39	Jenis	139.296.000	39	136.933.000	100	98,30	39	136.933.000	100,00	98,30	SubBAGUmpeg	
			04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengisian tabung pemadam kebakaran	2	Kali	113.253.969	-	-	2	Kali	26.536.469	2	25.640.000	100,00	96,62	2	25.640.000	100,00	96,62	SubBAGUmpeg	
			05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan kebutuhan dinas Perbanyak dokumen	22	Jenis	206.861.185	-	-	22	Jenis	64.559.650	22	63.509.450	100,00	98,37	22	63.509.450	100,00	98,37	SubBAGUmpeg	
			06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan surat kabar kebutuhan pegawai	12	Bulan	93.792.000	-	-	12	Bulan	29.106.000	12	29.106.000	100,00	100,00	12	29.106.000	100,00	100,00	SubBAGUmpeg	
			07	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Pengadaan cinderamata dinas Penyediaan makan dan minum tamu dinas	30	Buah	66.255.100	-	-	30	Buah	1.200.000	30	1.200.000	0,00	100,00	30	1.200.000	0,00	100,00	SubBAGUmpeg	
						10	Bulan	-	-	-	10	Bulan		10				10	-	0,00	0,00		

				08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat dan koordinasi tingkat kabupaten, provinsi dan nasional	12	Bulan	1.034.710.000	-	-	12	Bulan	81.850.000	12	80.948.639	100,00	98,90	12	80.948.639	100,00	98,90	SubBAGUmpeg	
				09	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pembayaran jasa tenaga rekrutmen	12	Bulan	245.903.192	-	-	12	Bulan	71.164.536	12	70.349.636	100,00	98,85	12	70.349.636	100,00	98,85	SubBAGUmpeg	
3	25	01	2.06		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	100	%	1.571.287.010	-	-	100	%	315.818.800	100	312.670.000	100,00	99,00	100	312.670.000	100,00	99,00	SubBAGUmpeg	
				01	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeleur kebutuhan dinas	3	Jenis	646.282.500	-	-	3	Jenis	84.904.000	3	83.620.000	100,00	98,49	3	83.620.000	100,00	98,49	SubBAGUmpeg	
				02	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4	Jenis	925.004.510	-	-	4	Jenis	230.914.800	4	229.050.000	100,00	99,19	4	229.050.000	100,00	99,19	SubBAGUmpeg	
							0		-	-	-										0,00	0,00		
3	25	01	2.07		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	100	%	3.232.675.874	-	-	100	%	950.099.015	100	856.868.812	100,00	90,19	100	856.868.812	100,00	90,19	SubBAGUmpeg	
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air Pembayaran Rekening Listrik Pembayaran rekening telepon	60	Rekening	2.282.183.665	-	-	60	Rekening	637.995.665	60	544.765.462	100	85,39	60	544.765.462	100,00	85,39	SubBAGUmpeg	
				02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran jasa tenaga keamanan Pembayaran jasa tenaga kebersihan	12	Bulan	950.492.209	-	-	12	Bulan	312.103.350	12	312.103.350	100	100,00	12	312.103.350	100,00	100,00	SubBAGUmpeg	
3	25	01	2.07		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	100	%	3.106.866.700	-	-	100	%	794.338.900	100	773.424.275	100,00	97,37	100	773.424.275	100,00	97,37	SubBAGUmpeg	
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang etrfasilitasasi	1	Jenis	120.000.000	-	-	1	Jenis	40.000.000	1	34.238.994	100,00	85,60	1	34.238.994	100,00	85,60	SubBAGUmpeg	
				02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran STNK Pemeliharaan kendaraan dinas Pergantian STNK Service Kendaraan	374	Unit	1.401.566.700	-	-	374	Unit	465.168.900	374	458.166.281	100,00	98,49	374	458.166.281	100,00	98,49	SubBAGUmpeg	
				03	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	4	Jenis	243.570.000	-	-			83.670.000		81.020.000		96,83		81.020.000	0,00	96,83	SubBAGUmpeg	
				04	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab gedung kantor Rehab Gedung UPT Wilayah Jasinga	2	Unit	1.341.730.000	-	-	1	Unit	205.500.000	1	199.999.000		97,32	1	199.999.000	0,00	97,32	SubBAGUmpeg	
					Urusan pertanian																			
3	26	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase keterpenuhan sarana Peternakan (bibit ternak)	100	%	7.570.547.517	-	-	22,25	%	1.792.136.184	28,86	1.788.593.157	129,69	99,80	29	1.788.593.157	129,69	99,80	Bidang Peternakan	

							Pengadaan bantuan ternak domba untuk PKH		48 Ekor		-	-	48 Ekor		48						48		-	0,00	0,00			
							Pertemuan Evaluasi UPSUS Sikomandan		120 Orang		-	-	45 Orang		30							30		-	0,00	0,00		
							Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasional UPT Pembibitan Ternak Kelas A	1 tahun			2.083.091.620																
							Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Air Conditioner				2.083.091.620																
								Kabel																				
								Kardus DOC																				
								Kursi Rapat																				
								Lampu LED																				
								Lampu Pijar																				
								Meja Rapat																				
								Mic																				
								Operasional UPT Pembibitan Ternak Kelas A																				
								Sekam																				
								Speaker Portable																				
								Tempat Minum ayam otomatis																				
								tempat pakan																				
								tersedianya Alat Kebersihan																				
								tersedianya Alat Tulis Kantor																				
								Tersedianya Bahan Bakar Minyak (Pertalite)																				
								tersedianya obat-obatan ternak																				
								tersedianya pakan ternak																				
								persentase Keterpuhan prasarana (infrastruktur)Peternakan																				
3	27	03					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	persentase Keterpuhan prasarana (infrastruktur)Peternakan	15 %		18.356.062.624		27,78 %	5.049.187.893	13,00	4.804.168.300	46,80	95,15	13				4.804.168.300	46,80	95,15			Bidang Peternakan
3	27	03	2.01				Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian	<i>Terpuhinya infrastruktur peternakan yang baik</i>	15 Unit		320.365.320	-	-	13 Unit	7.941.702	13	7.929.000	100,00	99,84	13			7.929.000	100,00	99,84			<i>Sie. Pemasaran dan Pengolahan hasil Peternakan</i>
					01		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Data Peternakan 2020	2 Kali		320.365.320	-	-	1 Kali	7.941.702	1	7.929.000	100,00	99,84	1			7.929.000	100,00	99,84			
								Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi Pemutakhiran Data 2021	2 Kali			-	-	Kali														
								Tersedianya Buku Data Peternakan 2020	75 Buku			-	-	30 Buku		30												
3	27	03	2.02				Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian	<i>Terpuhinya infrastruktur peternakan yang baik</i>	0 Unit		18.035.697.304	-	-	Unit	5.041.246.191		4.796.239.300	-	95,14	-			4.796.239.300	0,00	95,14			<i>sie Prasarana dan SDM Peternakan</i>
					07		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Operasional RPH	1 Tahun		4.451.141.603	-	-	1 Tahun	1.519.556.680	1	1.501.358.474	100,00	98,80	1			1.501.358.474	100,00	98,80			<i>sie Prasarana dan SDM Peternakan</i>

					Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Belanja Hibah Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0	Jenis	10.737.788.107	-	-	6	Jenis	1.100.087.536	6	899.049.994	100,00	81,73	6	899.049.994	100,00	81,73	sie Prasarana dan SDM Peternakan	
						Pengadaan Alat- alat Peternaka	13	Jenis	-	-	-	6	Jenis	-	6	-	-	-	-	0,00	0,00			
						Pengadaan Lahan TTP	0	M2	-	-	-	2000	M2	-	2000	-	-	-	-	0,00	0,00			
						Pengadaan N2 cair mendukung UPSUS	6000	Liter	-	-	-	3500	Liter	-	3500	-	-	-	-	0,00	0,00			
						Sikomandan Peningkatan sarana TTP Cigombong	1	Lokasi	-	-	-	1	Lokasi	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00			
						Pertemuan Sosialisasi Perizinan	2	Kali	-	-	-	-	Kali	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00			
					Sub Kegiatan :Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan POSKESWANKAN Wilayah III	1	Unit	410.965.000	-	-	1	Unit	387.436.000	1	387.015.000	100,00	99,89	1	387.015.000	100,00	99,89	sie Prasarana dan SDM Peternakan	
					Sub Kegiatan :Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Gedung Kantor UPT Wilayah Jonggol																		
					Sub Kegiatan :Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Gedung Kantor UPT Wilayah VI	0	Meter	1.120.115.000	-	-	20	Meter	1.057.581.440	20	1.039.160.200	100,00	98,26	20	1.039.160.200	100,00	98,26	sie Prasarana dan SDM Peternakan	
						Pembangunan Pagar		Meter	-	-	-	152	Meter	-	152	-	-	-	-	0,00	0,00			
					UPT Perbibitan Ternak Kelas A	Operasional UPT Perbibitan Ternak	5	Tahun	1.315.687.594	-	-	1	Tahun	976.584.535	1	969.655.632	100,00	99,29	1	969.655.632	100,00	99,29	sie Prasarana dan SDM Peternakan	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular	80	%	7.040.630.062	-	-	55	%	1.540.455.438	54,99	1.511.249.502	99,98	98,10	55	1.511.249.502	99,98	98,10	Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner	
									Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular															
3	27	04	2.01		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	7	Unit	5.241.832.737	-	-	7	Unit	1.191.037.612	7	1.172.285.910	100,00	98,43	7	1.172.285.910	100,00	98,43	Sie P3H	
				01	Sub Kegiatan 3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terlaksananya Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis (UPT I)	1	Tahun	693.696.070	-	-	1	Tahun	205.716.620	1	204.074.830	100,00	99,20	1	204.074.830	100,00	99,20	Sie P3H	
						Terlaksananya Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis (UPT II)	1	Tahun	703.901.917	-	-	1	Tahun	158.885.084	1	156.353.238	100,00	98,41	1	156.353.238	100,00	98,41	Sie P3H	
						Terlaksananya Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis (UPT III)	1	Tahun	692.290.576	-	-	1	Tahun	163.410.454	1	159.264.286	100,00	97,46	1	159.264.286	100,00	97,46	Sie P3H	

						1	Tahun	702.961.179	-	-	1	Tahun	158.776.272	1	154.483.572	100,00	97,30	1	154.483.572	100,00	97,30	Sie P3H		
						1	Tahun	906.452.853	-	-	1	Tahun	145.316.432	1	144.344.754	100,00	99,33	1	144.344.754	100,00	99,33	Sie P3H		
						1	Tahun	632.897.169	-	-	1	Tahun	171.109.932	1	169.776.618	100,00	99,22	1	169.776.618	100,00	99,22	Sie P3H		
			02		Sub Kegiatan 3.27.04.2.01.02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		5	Penyakit	909.632.973	-	-	5	Penyakit	187.822.818	5	183.988.612	100,00	97,96	5	183.988.612	100,00	97,96	Sie P3H	
3	27	04	2.02		Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota		26	Lokasi	761.708.174	-	-	12	Lokasi	149.074.336	12	147.858.824	100,00	99,18	12	147.858.824	100,00	99,18	sie. Kesmavet	
			01		Sub Kegiatan : 3.27.04.2.02.01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan		18	Lokasi	562.164.186	-	-	14	Lokasi	122.337.986	14	121.512.324	100,00	99,33	14	121.512.324	100,00	99,33	sie. Kesmavet	
					Pengembangan kader penanganan hewan qurban di DKM		10	Lokasi		-	-	1	Lokasi		1				1	-	0,00	0,00		
					Sosialisasi PAH / HPAH tingkat konsumen		10	Lokasi		-	-		Lokasi		-			-	-	-	0,00	0,00		
										-	-							-	-	-	0,00	0,00		
			02		Sub Kegiatan : 3.27.04.2.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		0	Lokasi	123.861.613	-	-	8	Lokasi	16.210.550	8	15.893.000	100,00	98,04	8	15.893.000	100,00	98,04	sie. Kesmavet	
					Pemeriksaan persyaratan teknis penerbitan saran teknis rekomendasi pemasukan hewan/produk hewan		20	Lokasi		-	-	10	Lokasi		10				10	-	0,00	0,00		
										-	-							-	-	-	0,00	0,00		
			03		Sub Kegiatan : 3.27.04.2.02.03 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		0	Lokasi	75.682.375	-	-	12	Lokasi	10.525.800	12	10.453.500	100,00	99,31	12	10.453.500	100,00	99,31	sie. Kesmavet	
										-	-							-	-	-	0,00	0,00		
3	27	04	2.03		Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota		0	Pelaku Usaha	696.710.236	-	-	40	Pelaku Usaha	166.997.040	40	160.156.268	100,00	95,90	40	160.156.268	100,00	95,90	Sie Pelayanan kesehatan hewan dan Obat hewan	

				02	Sub Kegiatan : 3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pembinaan unit layanan kesehatan hewan	0	Lokasi	696.710.236	-	-	40	Lokasi	166.997.040	40	160.156.268	100,00	95,90	40	160.156.268	100,00	95,90	Sie Pelayanan Kesehatan hewan dan Obat hewan		
						Penyediaan obat- obatan hewan	0	Jenis		-	-	24	Jenis		24				24	-	0,00	0,00			
3	27	04	2.04		Kegiatan : 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya pendampingan unit usaha	0	Pelaku Usaha	254.678.780	-	-	40	Pelaku Usaha	33.346.450	40	30.948.500	100,00	92,81	40	30.948.500	100,00	92,81	sie. Kesmavet		
				01	Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Workshop sertifikasiNKV dan Peredaran produk hewan antar wilayah	50	Pelaku Usaha	35.979.575	-	-	-	Pelaku Usaha						-	-	0,00		sie. Kesmavet		
				02	Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pembinaan dan pengawasan pemotongan di RPH/RPU	15	Lokasi	79.700.715	-	-	5	Lokasi	10.766.450	5	10.687.500	100,00	99,27	5	10.687.500	100,00	99,27	sie. Kesmavet		
						Pembinaan peredaran PAH / HPAH	15	Lokasi		-	-	9	Lokasi		9				9	-	0,00	0,00			
				03	Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pembinaan dan Pengawasan sertifikasi NKV 1	18	Lokasi	40.442.900	-	-	12	Lokasi	8.100.000	12	7.910.000	100,00	97,65	12	7.910.000	100,00	97,65	sie. Kesmavet		
				04	Sub Kegiatan:3.27.04.2.04.0 4 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengadaan food detection test	12	Paket	98.555.590	-	-	4	Paket	14.480.000	2	12.351.000	53,57	85,30	2	12.351.000	53,57	85,30	sie. Kesmavet		
						Pengujian laboratorium terhadap produk hewan	10	Sampel		-	-	35	Sampel		20				20	-	0,00	0,00			
					Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Pengawasan terhadap penerapat kesejahteraan hewan	40	Kecamata n	85.700.135																
					Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan	40	Kecamata n	85.700.135																
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan penanganan penyakit hewan zoonosis	3	Jenis	209.906.029												0,00	0,00	Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner		
3	27	05	2.03		Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		40	Kecamata n	209.906.029												0,00	0,00	Sie P3H		
				01	Sub Kegiatan : Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis		40	Kecamata n	209.906.029													0,00	0,00	Sie P3H	
						Peningkatan kapasitas SDM penanggulangan usabah zoonosis	40	Kecamata n																	
									Persentase Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pertanian (usaha pete						2.041.284							0,00	0,00		
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pertanian (usaha peternakan, izin usaha obat hewan di tingkat pengecer)	40	%	236.144.834	-	-	20	%	15.501.000	20	13.459.716	100,00	86,83	20	13.459.716	100,00	86,83	Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner		

											%	PREDIKAT KERJA									
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)											100,04	SANGAT TINGGI									
REALISASI ANGGARAN (BL)											98,21	SANGAT TINGGI									
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME/INDIKATOR PROGRAM)											97,17	SANGAT TINGGI									
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA KEGIATAN (OUTPUT/ KELUARAN KEGIATAN)											100,00	SANGAT TINGGI									
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (OUTPUT/ KELUARAN SUB KEGIATAN)											100,00	SANGAT TINGGI									
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN											96,87	SANGAT TINGGI									
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja : pembinaan di lapangan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : pemotongan anggaran pada perubahan anggaran TA 2021 sehingga pekerjaan fisik dan non fisik terhenti sementara																					

9.921.843.928

Cibinong, April 2021

Disusun
KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BOGOR

(.....)

NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN:

- Baris Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPd: diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Daerah kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPd kabupaten sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi.
- Kolom 1: diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah/program/kegiatan
- Kolom 2: diisi dengan:
 - Uraian nama urusan pemerintahan daerah
 - Uraian bidang urusan
 - Uraian judul program yang direncanakan
 - Uraian judul kegiatan yang direncanakan
- Kolom 3: diisi dengan Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten
- Kolom 4: diisi dengan:
 - Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renstra Perangkat Daerah pada Tabel Program dan Kegiatan Renstra PD di Kolom 18 (target) dan 19 (Rp) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
 - Angka tahun diisi dengan tahun terakhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten
 - Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K), Satuan (S) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten , mulai tahun pertama sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten
 - Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K), Satuan (S) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten , mulai tahun pertama sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten
- Kolom 5: diisi dengan:
 - Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen realisasi APBD mulai Tahun pertama periode Renstra PD
 - Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra kabupaten sampai dengan tahun n-2. Bila kinerja
 - Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-2.
- Kolom 6: diisi dengan:
 - Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten tahun berjalan (tahun n-1)
 - Untuk baris program diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) dan satuan (S) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten tahun berjalan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan Renja kabupaten tahun berjalan
 - Untuk baris kegiatan diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K), Satuan (S) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten tahun berjalan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan Renja kabupaten tahun berjalan
 - Untuk baris Sub kegiatan diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K), Satuan (S) untuk setiap Sub kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten tahun berjalan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap Sub kegiatan sesuai dengan Renja kabupaten tahun berjalan
- Kolom 7 sampai dengan Kolom (10) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten tahun berjalan
- Kolom 11: diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program, Kegiatan dan Sub kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi
- Kolom 12: diisi dengan rasio diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renja PD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp).

- Kolom 13: diisi dengan diisi realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra perangkat daerah kabupaten / kabupaten pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja PD kabupaten / kabupaten yang dievaluasi
- Kolom 14: diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra perangkat daerah kabupaten / kabupaten sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja PD kabupaten / kabupaten yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)
- Kolom 15: diisi dengan nama unit perangkat daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja PD kabupaten / kabupaten yang dievaluasi
- Kolom 16: diisi dengan keterangan atau catatan atas pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan
- Jumlah Program : Total Program yang dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Jumlah Kegiatan : Total Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Jumlah Sub Kegiatan : Total Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Pagu Anggaran : Jumlah Anggaran yang ditetapkan APBD tahun berkenaan'
- Realisasi Anggaran : Jumlah Realisasi Anggaran sampai dengan tahun berjalan
- RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) (Total Tingkat Capaian IKU PD dibagi dengan Jumlah IKU PD)
- REALISASI ANGGARAN (BL) diisi dengan realisasi belanja langsung perangkat daerah (total anggaran seluruh kegiatan dibagi dengan total realisasi anggaran seluruh kegiatan)
- RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM diisi dengan Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Seluruh Program (Outcome/Indikator Program)
- RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA KEGIATAN (OUTPUT/ KELUARAN KEGIATAN) diisi dengan Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Seluruh Kegiatan (Output/ Keluaran Kegiatan)
- RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (OUTPUT/ KELUARAN SUB KEGIATAN) diisi dengan Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Seluruh Kegiatan (Output/ Keluaran Kegiatan)
- RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN diisi dengan Rata Rata Tingkat Capaian Anggaran Seluruh Kegiatan (Total Tingkat Capaian Anggaran Kegiatan (%) dibagi dengan Jumlah Kegiatan)
- Baris Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja: diisi oleh Kepala Perangkat Daerah kabupaten dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target
- Baris Faktor penghambat keberhasilan pencapaian kinerja: diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas

Tabel 2.2 hasil pencapaian dukungan terhadap pancakarsa tahun 2021

Dinas Perikanan dan Peternakan

Nama Pancakrsa	Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan Pancakarsa (Nama Kegiatan Pancakarasa)	Target Pancakarsa 2021	Anggaran Pancakarsa 2021	Realisasi Target Pancakarsa	Realisasi Anggaran Pancakarsa	Keterangan/Progres/Kendala
Pembudidaya Ikan Milenial							TIDAK ADA Anggaran
Petani Milenial Peternakan							TIDAK ADA Anggaran

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023

URUSAN / UNSUR : PILIHAN
BIDANG URUSAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PERKIRAAN MAJU	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%		25.597.770.503	Kab. Bogor	APBD		31.589.154.628
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dokumen	16	399.148.576	Kab. Bogor		16	478.700.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Renja - Jumlah Dokumen Perubahan Renstra	dokumen	2	120.077.054			2	150.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	dokumen	1	16.686.518			1	20.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	17.467.328			1	20.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA SKPD - Jumlah dokumen Perjanjian kinerja SKPD	Dokumen	1	16.632.295			1	20.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD - Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian kinerja SKPD	Dokumen	1	14.216.353			1	20.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja dan keuangan SKPD	Dokumen	3	69.946.801			3	73.700.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen laporan hasil monev - jumlah laporan evkin - jumlah publikasi kinerja PD - jumlah buku agenda - Jumlah buku Monografi - Buku Profile	Dokumen	1	144.122.227			1	175.000.000
				Dokumen	1				1	
				Media	20				20	
				Buku	50				50	
				Buku	50				50	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penatausahaan dan laporan keuangan perangkat daerah	Tahun	1	21.757.155.995			1	25.949.278.228
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah ASN yang difasilitasi Gaji dan Tunjangan nya	Tahun	1	21.710.865.611			1	25.906.578.228
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah pelaksanaan Penatausahaan dan verifikasi Keuangan	Bulan	12	14.591.440			12	9.240.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi	Dokumen	1	5.399.822			1	6.500.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PERKIRAAN MAJU	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir	Dokumen	1	8.399.928			1	9.240.000
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	1	-			1	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semester	Dokumen	4	12.466.157			4	11.220.000
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	5.433.037			1	6.500.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dokumen administrasi barang milik daerah	Tahun	1	93.304.085	Kab. Bogor		1	120.000.000
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengelolaan barang milik daerah	PD	1	93.304.085			1	120.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Kepegawaian	Layanan	3	215.177.288	Kab. Bogor		3	250.000.000
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Buah	1	67.155.000			1	50.000.000
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah jenis pendataan dan pengolahan administrasi yang disusun	Jenis	5	148.022.288			5	200.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang terfasilitasi	Layanan	9	862.678.266	Kab. Bogor		9	1.292.400.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	Jenis		53.950.379				59.400.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis		120.169.820				350.000.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang Tersedia	Jenis		74.898.359				82.500.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	Jenis		37.904.724				49.500.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Penyediaan barang cetakan kebutuhan dinas	Jenis		64.835.950				71.500.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan majalah yang tersedia	Jenis	0				5	49.500.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah Penyediaan makan dan minum tamu dinas - Jumlah Cendramata	Porsi Buah	0				200 10	60.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PERKIRAAN MAJU	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah	Tahun	1	431.313.000			1	450.000.000
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah penatausahaan arsip dinamis yang dilaksanakan	Jenis	10	79.606.034			10	120.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah yang terfasilitasi	Layanan	2	232.840.589	Kab. Bogor		2	800.000.000
		Pengadaan Mebel	- Jumlah Mebeleur yang disediakan	Jenis	4	116.180.589			4	350.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Tersedia	Jenis	3	116.660.000			3	450.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan penunjang perangkat daerah	Jenis	2	998.455.484	Kab. Bogor		2	1.280.976.400
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang Dibayarkan	Rekening	3	685.340.000			3	759.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Pembayaran jasa tenaga keamanan - Pembayaran jasa tenaga kebersihan	Bulan Bulan	12 12	313.115.484			12 12	521.976.400
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang etrfasilitasi	Layanan	4	1.039.010.220	Kab. Bogor		4	1.417.800.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pejabat Eselon II	Unit	1	42.546.300			1	52.800.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Pembayaran STNK - Jumlah Pemeliharaan Kendaraan - Jumlah Pergantian STNK - Jumlah Kendaraan yang di service	Unit Unit Unit Unit	107 140 10 117	459.269.200			107 140 10 117	605.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Jenis	4	88.350.000			4	110.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Rehab gedung kantor	Unit	2	448.844.720			2	650.000.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Total hasil tangkapan ikan di perairan umum	Ton	110	724.701.706	Kab. Bogor	APBD	110	502.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PERKIRAAN MAJU	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah data, Prasarana dan sarana usaha perikanan tangkap	Jenis	3	477.131.959	Kab. Bogor		3	327.000.000
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	- Rapat Data Perikanan Tangkap	Kali	1	159.535.300			1	160.000.000
			- Rapat Validasi Data Tangkap	Kali	4				4	
			- Pengadaan Peralatan Kompouter (Hard disk 5 T)	Buah	1				1	
			- Validasi Data Tingkat Provinsi	Kali	6				6	
			- Penggandaan buku data perikanan tangkap	Buku	100				125	
			- Form Pendataan Produksi Perikanan	Lembar	1000				1000	
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	- Sosialisasi Pokmaswas	Kali	6	317.596.659			6	167.000.000
			- Bantuan sarana pokmaswas	Paket	5				5	
			- Pembangunan saung pokmaswas	Unit	1				1	
			- Alat Kerja Pokmaswas	Jenis	3				3	
			- Prasarana RTP Tangkap/Nelayan	Buah	840					
			- Bantuan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	150	Set					
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	- Pengadaan ikan mas & Nila	Kg	0				18 ? ?	
			- Koordinasi Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum	Kec	0					
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Nelayan kecil yang di berdayakan di Kabupaten Bogor	Pokmaswas	2	247.569.747	Kab. Bogor		2	175.000.000
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	- Benih Ikan (4 Jenis)	Ekor	150000	247.569.747			4	175.000.000
			- Koordinasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan	Kec	10				10	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Kontribusi Produksi Benih Ikan terhadap target total	%	33,67	7.114.551.157	Kab. Bogor	APBD	33,67	5.894.000.000
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terpenuhinya layanan sosialisasi penerbitan izin usaha perikanan budidaya	Kec	16	20.031.922	Kab. Bogor		20	35.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PERKIRAAN MAJU	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	- pembuatan brosur untuk Sosialisasi Izin Usaha Perikanan Budidaya	Lembar	500	20.031.922			500	35.000.000
			- Sosialisasi Izin Usaha Perikanan Budidaya	Kec	16				20	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Terfasilitasinya petugas dan masyarakat pembudidaya ikan dan pengembangan budidaya perikanan	Kecamatan	40	904.304.113	Kab. Bogor		40	594.000.000
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	- Honorarium Penyuluh Perikanan Swadaya (27 Orang @600.000) - Bantuan Buku Perikanan (P2MKP) - Pembinaan P2MKP - Raker Koperasi Perikanan - Raker Mitra Posikandu - Raker PPS - Raker UPP - Cendramata Dinas	Orang P2MKP Kali Kali Kali Kali Kali Buah	38 12 1 1 1 1 1 50	557.295.402			12 12 1 1 1 1 1 50	275.000.000
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	- Pengadaan ikan dempond TTP Cigombong - Pengadaan pakan dempond TTP Cigombong - Pengadaan ikan dempond minapolitan - Pengadaan pakan dempond minapolitan - Pengadaan aquascape	Jenis Jenis Jenis Unit	3 4 3 4 1	347.008.711			3 4 3 4 1	319.000.000
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersosialisasikannya Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Perizinan Berusaha Perikanan kepada para pelaku usaha perikanan	Kec	20	20.096.819	Kab. Bogor		1	45.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PERKIRAAN MAJU	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- pembuatan brosur untuk Sosialisasi Perizinan Berusaha Perikanan Budidaya - Sosialisasi Perizinan Berusaha Perikanan Budidaya	Lembar Kec	500 20	20.096.819			500 20	45.000.000
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Penyediaan sarana prasarana pembudidayaan ikan (Seksi)	Kecamatan	40	1.593.910.657	Kab. Bogor		40	620.000.000
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Pengadaan Buku data perikanan 2021 - Pembuatan papan nama enumerator - honorarium enumerator perikanan (13 Orang x 5 Hari x 12 bulan) - Koordinasi Pendataan Perikanan - Evaluasi Kegiatan	Buah Buah Bulan Kali Kali	35 13 12 1 1	154.190.189			35 13 12 1	120.000.000
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				997.621.021			60	325.000.000
			- Bimtek Peningkatan kualitas produksi - Bantuan Induk Ikan Konsumsi - Bantuan KPM (benih ikan Lele) - Bantuan P2WKSS (Ikan Hias) - Bahan Percontohan KPM - Sarana Budidaya Ikan KPM - Sarana Budidaya Ikan KPM (Bahan Instalasi Kolam) - Sarana Budidaya Induk Ikan - Sarana Budidaya P2WKSS - Bantuan Pakan Induk - Bantuan Pakan KPM - Bantuan Pakan P2WKSS - Sosialisasi KSM PKH	Orang Kg Ekor Ekor Jenis Jenis Jenis Jenis Kg Kg Kg Kg Kali	60 450 60000 180 3 3 12 5 5 1840 7200 60 1			60 450 60000 180 3 3 12 5 5 1840 7200 60 1		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PERKIRAAN MAJU	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Sosialisasi Kesehatan Ikan - Bahan reagent kimia - Obat pelayanan kesehatan ikan - Obat di posikandu - Obat di UPT - Jasa Uji Analisa Laboratorium - Pengadaan Alat Uji Kualitas Air	Kali Jenis Jenis Jenis Jenis Sampel Jenis	1 7 5 3 3 30 6	195.250.487			1 7 5 3 30 6	175.000.000
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Bimtek Peningkatan Kualitas Usaha Ikan Hias Petani Milenial Peralatan Festival Uang Saku Peserta Sosialisasi Belanja hadiah yang Bersifat Perlombaan Jasa Festival (tenda, panggung, kursi, sound system, dekorasi MC)	Orang Jenis Orang Group Kali	60 5 120 3 1	246.848.960				225.000.000
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Penyediaan sarana prasarana pembudidayaan ikan di BBI Cibitung	Tahun	1	2.249.418.068	Kab. Bogor		1	2.150.000.000
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasional BBI Cibitung dan Cibening	Tahun	1	2.249.418.068			1	2.150.000.000
			Bahan Bakar Oksigen Induk ikan bawal Induk ikan gurame Induk ikan mas Induk ikan nila nirwana gps Peralatan operasional kolam Suku Cadang-Suku Cadang (Jet Pump) Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Pera Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Alat/bahan kegiatan Obat-obatan Pakan Pemeliharaan Mesin Rumput Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - Personal Komputer/Notebook Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - Printer Alat produksi perikanan	Liter Tabung kg kg kg ekor Jenis Unit Jenis Jenis Jenis Jenis Paket Unit/tahun Unit/tahun Jenis	510 54 900 900 900 8.000 5 1 16 4 5 5 4 6 6 2 2			510 54 5 1 4 1 2 2 200		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PERKIRAAN MAJU	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Mesin potong rumput Pengadaan Modem Rehab Kolam	Unit Unit Meter	2 1 900					
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Penyediaan sarana prasarana pembudidayaan ikan di BBI Cijeruk	Tahun	1	2.326.789.578	Kab. Bogor		1	2.450.000.000
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Operasional BBI Cijeruk dan Rancabungur	Tahun	1	2.326.789.578			1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.450.000.000
			- Penyediaan Induk Ikan	Ekor	2420					
			- Penyediaan Pupuk Kandang	Kg	4500					
			- Perabot Kantor	Jenis	13					
			- Peralatan Kantor	Jenis	9					
			- Pakan	Kg	7500					
			- Pemeliharaan Mesin Rumput	Paket	4					
			- Pemeliharaan Gedung Kantor	M2	50					
			- Pengaspalan jalan Produksi BBI Cijeruk	m2	436					
			- Pemasangan Pavin Block BBI Cijeruk	m2	260					
			- Pembangunan Aula BBI Cijeruk	m2	50					
4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Persentase Usaha Perikanan Budidaya dan Tangkap di Perairan Umum	%	44,44	330.212.218	Kab. Bogor	APBD	44,44	265.000.000
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		Jumlah usaha perikanan tangkap dan budidaya yang diawasi	Pelaku usaha	40	330.212.218	Kab. Bogor		40	265.000.000
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Sosialisasi	Orang	30	144.878.313			60 4	120.000.000
			Bimtek	Orang	30					
			Perjadin	Kecamatan	10					
			Saluran Irigasi di Ecovillage	Paket	1					

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PERKIRAAN MAJU	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	bantuan stimulan dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat di saluran irigasi/perairan umum untuk ecovillage perikanan	Paket	1	185.333.905			90 4	145.000.000
			buku data pemanfaatan situ dan sungai untuk pembudidayaan ikan	Buku	30					
			buku daftar obat herbal yang ramah lingkungan untuk kegiatan budidaya di perairan umum	Buku	30					
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
										-
										-
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Jumlah Total Jumlah Produksi Olahan Perikanan	Ton	17.524	1.807.470.908	Kab. Bogor	APBD	17.524	3.025.000.000
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Data dan informasi usaha Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Jenis	2	244.319.867	Kab. Bogor		2	450.000.000
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Bazar Produk Perikanan - Evaluasi KUSUKA - Pendataan Informasi Pasar Ikan Konsumsi - Pendataan Informasi Pasar Ikan Non Konsumsi - Sosialisasi Perizinan Usaha - Data dan Informasi Usaha pemasaran dan pengolahan	Kali Kali Produk Kec Kec Kali	4 2 8 10 5 5	244.319.867			4 2 10 20 5 5	450.000.000
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Terpenuhinya standar mutu produk olahan perikanan	Pelaku Usaha Orang	75 500	247.959.987	Kab. Bogor		75 500	500.000.000
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Demo olahan ikan dengan Mobil ATI Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Sosialisasi PMMT Diseminasi olahan hasil perikanan Penyuluhan Keamanan Pangan Pembinaan pelaku usaha, pengawasan mutu dan pendataan bahan asal ikan	Kali paket Kali Kali Kali Kec	10 350 1 1 1 10	247.959.987			20 350 2 2 2 15	500.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PERKIRAAN MAJU	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Tersedianya bahan baku industri pengolahan ikan dan fasilitas bagi pelaku usaha perikanan mikro dan kecil	Pelaku Usaha	25	1.315.191.054	Kab. Bogor		25	2.075.000.000
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah	- pertemuan supplier olahan ikan - pertemuan supplier ikan konsumsi - pendataan ketersediaan ikan	Kali Kali Kec	1 1 26	158.980.546			1 2 2	275.000.000
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- pelatihan untuk KPM penerima bantuan PKH - sarana pengolahan dan pemasaran bagi KPM PKH - Pelatihan branding produk - pelatihan wirausaha baru	Kali KPM Kali Kali	1 8 1 1	252.210.048			1 8	350.000.000
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Operasional UPT Sarana Usaha Perikanan	Tahun	1	904.000.460	Kab. Bogor		1	1.450.000.000
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasional UPT Sarana Usaha Perikanan Kelas A - Pembuatan Turap dan Pengcoran Jalan di Lahan PIH Sukaraja - Rehab Bangunan Depo Ikan Hias Cibinong - Rehab Bangunan Bursa Ikan Hias Laladon	Tahun Paket Paket Paket	1 1 1 1	904.000.460			1 1 1 1	1.450.000.000
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Keterpenuhan sarana Peternakan (bibit ternak)	%	44,41	7.418.189.254	Kab. Bogor	APBD	44,41	5.095.000.000
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Terfasilitasinya pengelolaan sumberdaya genetik (SDG) sektor peternakan	Kali	4	302.166.295	Kab. Bogor		4	550.000.000
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Bimtek Pemasaran untuk Petani Milenial Gerakan Minum Susu di Sekolah Gerakan Minum Susu di Sentra Budidaya Sapi Perah Pertemuan Diseminasi Teknologi Pengolahan Hasil Peternakan	Orang Orang Orang Orang	50 200 200 50	302.166.295			2 3 1	550.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PERKIRAAN MAJU	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Bimtek Budidaya Peternakan/Pengolahan Limbah untuk Petani Milenial Promosi Produk Hasil Budidaya Peternakan (Pameran dan Bazaar) Pendataan Informasi Pasar Produk Peternakan di 8 Pasar Tradisional	Orang Kali Kali	50 8 2					
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pengawasan mutu benih/bibit ternak	Jenis	2	96.848.578	Kab. Bogor		2	175.000.000
		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pengawasan Pakan dan Bibit Ternak	Kecamatan	13	96.848.578			35	175.000.000
			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	13					
			Pengujian Sampel Pakan Ternak	Sampel	65					
			Workshop Hijauan Pakan Ternak untuk Petani Milenial	Orang	25					
			Workshop Hijauan Pakan Ternak untuk Kelompok	Orang	10					
			Workshop Pakan Ternak untuk Petani Milenial	Orang	30					
			Workshop Tilik Ternak	Orang	25					
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Tersedianya benih/bibit ternak	Jenis	2	4.031.218.725	Kab. Bogor		2	2.420.000.000
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kab/Kota lain	ekor	408	4.031.218.725			14	1.350.000.000
			Obat-obatan ternak besar untuk masyarakat	Jenis	8					
			Obat-obatan ternak kecil untuk masyarakat	Jenis	8					
			Obat-obatan ternak pkh untuk masyarakat	Jenis	9					
			Obat-obatan TTP Cigombong	Jenis	8					
			Obat-obatan SIKOMANDAN	Jenis	14					
			Evaluasi SIKOMANDAN	Jenis	8					
			Sosialisasi Budidaya Ternak PKH	Kali	3					

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PERKIRAAN MAJU	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Operasional UPT Pembibitan Ternak Kelas A	Tahun	1	2.257.050.112	Kab. Bogor		1	1.950.000.000
		Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Tersedianya Bahan Bakar Minyak (Pertalite)	Liter	720	2.257.050.112			720	1.950.000.000
			tersedianya Alat/Bahan Kegiatan Kantor	Jenis	2				2	
			tersedianya Alat Kebersihan	Jenis	11				11	
			tersedianya Alat Listrik	Jenis	3				3	
			tersedianya Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	Jenis	4				4	
			tersedianya obat-obatan ternak	Jenis	11				11	
			Tersedianya Air Bersih	Tangki	48				48	
			tersedianya pakan ayam	Kg	78,893				78,893	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Operasional UPT Pembibitan Ternak Kelas A	Tahun	1	730.905.544	Kab. Bogor		1	350.000.000
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	730.905.544			720	350.000.000
			alat-alat kebersihan kantor TTP Cigombong	Jenis	3					
			Pakaian Dinas lapangan	Stel	3					
			Internet TTP Cigombong	Sambungan	1					
			Pembayaran Jasa Keamanan	Orang	3					
			Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Jenis	9					
			Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Jenis	14					
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Keterpenuhan prasarana (infrastruktur) Peternakan	%	38,89	2.322.101.257	Kab. Bogor	APBD	38,89	3.225.000.000
	Pengembangan Prasarana Pertanian		Tersedianya data dan informasi sektor peternakan	Jenis	1	119.998.241	Kab. Bogor		1	175.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Pertemuan Evaluasi Data Peternakan 2022	Kali	1	119.998.241				175.000.000
			Pertemuan Rapat Persiapan	Kali	1					
			Pertemuan Pemutaakhiran Data Peternakan	Kali	1					

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PERKIRAAN MAJU	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tersedianya Blangko Pendataan	Lembar	5000					
			Tersedianya Buku Data Peternakan Tahun 2022	Buku	50					
			Tersedianya Petunjuk Teknis Kegiatan	Buku	5					
			Tersedianya Laporan Akhir Kegiatan	Buku	5					
	Pembangunan Prasarana Pertanian		persentase Keterpenuhan prasarana (infrastruktur) Peternakan	%	38,89	2.202.103.016	Kab. Bogor		38,89	3.050.000.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Belanja Bahan-bahan Kimia	Jenis	3	1.352.095.345			15	1.850.000.000
			Belanja Bahan-bahan /Bibit tanaman	Stek	20					
			Belanja Bahan-bahan Lainnya	Jenis	2					
			Rehabilitasi Ruang Brooder	Paket	1					
			Belanja Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	Jenis	5					
			Pengadaan Mesin Tetas Telur Petani Milenial	Unit	4					
			Pembangunan Hatchery UPT Perbibitan Rumpin	M2	52					
			Pembangunan Gudang Pakan UPT Perbibitan Sipak	Paket	1					
			Pembangunan Kandang Postal UPT Perbibitan Rumpin	M2	72					
			Rehabilitasi Gudang Pakan UPT Perbibitan Rumpin	M2	60					
			Pembangunan Kandang Display Domba dan Ayam TTP Cigombong	M2	25					
			Rehabilitasi Pagar TTP Cigombong	M2	140					
	Pembangunan Prasarana Pertanian		Tersedianya Fasilitas Pematangan Hewan yang ASUH di Kabupaten Bogor	Instalasi	5	850.007.671	Kab. Bogor		5	1.200.000.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Bahan-Bahan Kimia	Jenis	2	850.007.671			5	1.200.000.000
			Bahan-Bahan Lainnya	Jenis	3					
			Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	Jenis	4					
			Pengadaan Pompa	Jenis	3					
			Perbaiki galvanis Gangway RPHR Cibinong	Unit	1					
			Pemeliharaan Gedung dan Bangunan RPHR Cibinong	Unit	1					
8	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular	%	70	2.783.195.671	Kab. Bogor	APBD	70	3.497.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PERKIRAAN MAJU	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pengendalian Penyakit hewan menular dan zoonosis	Kecamatan	40	2.064.322.237	Kab. Bogor		40	2.327.000.000
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	- Obat-Obatan-Obat-Obat Lainnya - pembinaan biosecurity 3 zona - Rakor penerapan biosecurity - workshop kewaspadaan penyakit leptospirosis	Botol Orang Orang Orang	353 40 30 30	275.006.627			500 10	450.000.000
		Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Operasional UPT KESWANKAN I	Tahun	1	219.999.782			1	300.000.000
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Operasional UPT KESWANKAN II	Tahun	1	209.999.207			1	320.000.000
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Operasional UPT KESWANKAN III	Tahun	1	219.997.923			1	315.000.000
		Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Operasional UPT KESWANKAN IV	Tahun	1	614.322.730			1	345.000.000
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Operasional UPT KESWANKAN V	Tahun	1	224.999.870			1	365.000.000
		Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Operasional UPT KESWANKAN VI	Tahun	1	299.996.098			1	232.000.000
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Terawasinya peredaran hewan dan produk hewan di Kabupaten Bogor	Kecamatan	40	320.529.005	Kab. Bogor		40	820.000.000
		Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan Bahan Percontohan - Pelatihan Pengembangan Kader Penanganan HQ - Honor Petugas Pemeriksa Hewan Qurban (Mahasiswa IPB) - Koordinasi Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi Pengamanan Hewan Qurban	Laporan Ekor Orang Orang Orang Orang	12 5 150 75 25 25	256.816.676			10 150 150	420.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PERKIRAAN MAJU	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Pemeriksaan kesehatan hewan/produk hewan dalam rangka penerbitan Sertifikat Veteriner	Laporan Kali	2 9	32.738.282				225.000.000
		Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Pengawasan Peredaran PAH/HPAH Menjelang Idul Fitri	Laporan Kali	3 10	30.974.047			20	175.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	Laporan	12	344.953.124	Kab. Bogor		1	225.000.000
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jenis Kec	21 40	344.953.124				225.000.000
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Pengawasan terhadap penerap teknis kesehatan masyarakat veteriner	Kecamatan	40	53.391.305	Kab. Bogor		40	125.000.000
		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	- Workshop Sertifikasi NKV - Workshop Kesejahteraan hewan Pembinaan dan pengawasan sertifikasi NKV - Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan di RPH/RPU	Orang Kali Kali	20 36 5	53.391.305			30 15 5	125.000.000
			Pembinaan dan Pengawasan Peredaran PAH/HPAH	Kali	1				15 5	
			- Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan di RPH/RPU - Pembinaan dan Pengawasan Peredaran PAH/HPAH	Kali Kali	5 1				15 5	
		Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pembinaan dan pengawasan sertifikasi NKV	Kali	36				40	
		Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengujian sampel Pengambilan Sampel	Sampel Kali	20 18				20 18	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan		Pengawasan terhadap penerap kesejahteraan hewan	Kecamatan	40	-	Kab. Bogor		40	-
		Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Sosialisasi							
										-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PERKIRAAN MAJU	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Jumlah penyakit yang dikendalikan	Jenis	3	90.000.149	Kab. Bogor	APBD	3	140.000.000
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Terkendalnya penyebaran penyakit hewan menular akibat bencana	Kecamatan	40	90.000.149	Kab. Bogor		40	140.000.000
		Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat	Workshop kesiapsiagaan bencana non alam	Orang	20	90.000.149			20	140.000.000
			Workshop kewaspadaan wabah	Orang	40				20	
			Workshop Simulasi penanganan	Orang	40				20	
10	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pertanian (usaha peternakan, izin usaha obat hewan di tingkat pengecer)	%	40	75.956.647	Kab. Bogor	APBD	40	150.000.000
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian (peternakan) bagi pelaku usaha	Pelaku Usaha	65	52.967.844	Kab. Bogor		65	100.000.000
		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Bimbingan Teknis Izin Usaha melalui OSS	Orang	50	22.972.824			50	50.000.000
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Pembinaan dan Pengawasan izin usaha	Kali	15	29.995.020			15	50.000.000
										-
	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan		Terfasilitasinya penerbitan perizinan usaha obat hewan di tingkat pengecer	Pelaku Usaha	20	22.988.803	Kab. Bogor		20	50.000.000
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Sosialisasi penerbitan izin usaha obat hewan	Kec	40	22.988.803				50.000.000
			- Pengawasan obat hewan tingkat pengecer	Kec	40					
			- pendataan pelaku usaha obat hewan	Kec	40					
11	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentasi kenaikan kelas kelompok	%	25	317.536.437	Kab. Bogor	APBD	25	350.000.000
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	25	317.536.437	Kab. Bogor		6	350.000.000
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Demplot/Kursus Tani Peternakan	Kali	2	317.536.437				350.000.000
			Pertemuan Peningkatan SDM PPS Peternakan	Kali	1					
			Pertemuan Peningkatan SDM Penyuluhan Peternakan	Kali	2					
			Pembayaran Jasa Tenaga Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) Peternakan	Orang	25					
TOTAL						48.581.685.907				53.732.154.628